

**ANALISIS PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KAMPAR
(STUDI PENGRAJIN PANDAI BESI DI KECAMATAN RUMBIO
JAYA)**

Oleh :

**Defi Chinthia Putri
16 7322 033**

TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Pemerintahan
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Defi Chinthia Putri
NPM : 167322033
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Analisis Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya)

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

Hari : Rabu
Tanggal : 22 April 2020
Pukul : 09:30-10:30 WIB

Dan Dinyatakan LULUS
PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

Sekretaris



Dr. H. Nurman, S.Sos, M.Si.

Anggota



Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.

Anggota



Dr. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau



(Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.)

ANALISIS PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN
KAMPAR
(STUDI PENGRAJIN PANDAI BESI DI KECAMATAN RUMBIO JAYA)

TESIS


Oleh:

DEFI CHINTHIA PUTRI
16 7322 033

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal, 29.10.2019



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H. M. Hum.

Pembimbing II

Tanggal, 26.12.2019


Dr. H. Nurman, S. Sos., M.Si.

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau


Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau,
Telp. (+62) (761) 67 4717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 67 4717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 633/KPTS/PPs-UIR/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
- Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
 - Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut
 - Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat**
- Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 - Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
- Memperhatikan**
- Surat Permohonan saudara Defi Chintia Putri tanggal 10 Oktober 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Menunjuk :

No	Nama Dosen Pembimbing	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Prof. Dr. H. Yusni Munaf, S.H., M.Hum.	Guru Besar	Pembimbing I
2	Dr. H. Nurman, S.Sos., M.Si	Lektor Kepala	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa

Nama : DEFY CHINTIA PUTRI
N.P.M : 16 732 2033
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : "ANALISIS PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAMPAR (STUDI PENGRAJIN PANDAI BESI DI KECAMATAN RUMBIO JAYA)"

- Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
- Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
- Kepada yang bersangkutan dibenarkan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau
- Dengan terbitnya surat keputusan ini, maka segala sesuatu yang bertubuhan dengan ketentuan tersebut di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan ditandatangani.

DITETAPKAN DI PEKANBARU
PADA TANGGAL 16 Oktober 2019
Direktur

Dr. Ir. Saiful Bahri, M.Ed.
NPK: 52.11.02.199

Terbaca : Disampaikan kepada
1. Fh. Rektor Universitas Islam Riau @ Pekanbaru
2. Fh. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS UIR @ Pekanbaru

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Riau Program Studi Ilmu Pemerintahan peserta ujian tesis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Defi Chinthia Putri
NPM : 167322033
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Analisis Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian tesis ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah tesis ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian tesis yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,



Defi Chinthia Putri

Defi Chinthia Putri



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 339/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Defi Chintia Putri
NPM : 167322033
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 28 Januari 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister
Ilmu Pemerintahan


Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Pekanbaru, 4 Februari 2020

Staf Perpustakaan


Sumardiono, S.IP

Lampiran:
- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

ANALISIS PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAMPAR (STUDI PENGRAJIN
PANDAI BESI DI KECAMATAN RUMBIO JAYA) **by Delfi Chinthia Putri**



From Prodi. Ilmu Pemerintahan (Tesis 2)

- Processed on 28-Jan-2020 14:56 +08
- ID: 1247576944
- Word Count: 20578

Similarity Index

21%

Similarity by Source

Internet Sources:

19%

Publications:

4%

Student Papers:

16%

sources:

- 1 4% match (Internet from 13-Sep-2019)
<http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/download/510/483>
- 2 2% match (Internet from 17-Dec-2012)
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/259/Sknips%20Umar%20Nyatu%20untuk%20cd.pdf?sequence=1>
- 3 2% match (Internet from 29-Sep-2015)
[http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/JOERNAL%20PADIL%20\(05-31-13-09-51-14\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/JOERNAL%20PADIL%20(05-31-13-09-51-14).pdf)
- 4 2% match (Internet from 23-Aug-2018)
<http://dw-online.blogspot.com/>
- 5 2% match (Internet from 24-Jan-2019)
<http://olis-noer.blogspot.com/2012/>
- 6 1% match (Internet from 10-Jul-2019)
<https://peraturan.bpk.go.id/Home?Search?entitas=453&page=1&tahun=2017>
- 7 1% match (Internet from 04-Mar-2019)
<http://aummikely.blogspot.com/>
- 8 1% match (student papers from 15-May-2018)
Submitted to Universitas Islam Riau on 2018-05-15
- 9 1% match (Internet from 12-Sep-2019)
[https://www.ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/JOERNAL%20PADIL%20\(05-31-13-09-51-14\).doc](https://www.ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/JOERNAL%20PADIL%20(05-31-13-09-51-14).doc)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin Segala Puji bagi Allah SWT, pengatur alam semesta, seluruh isi langit dan bumi. Dialah yang Maha Kekal, tidak akan rusak dan tidak akan mati, yang telah memberikan rahmad dan hidayahnya sehingga penulis bias menyelesaikan penulisan tesis ini sesuai dengan waktunya. Semoga shalawat dan salam tetap allah anugerahkan kepada sang pembawa cahaya, perintis kemanusiaan dan petunjuk jalan, junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, Ibunda dan Ayahanda tercinta yang selalu mendoakan saya dalam setiap sujudnya sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan, dan tak lupa kepada Suami dan Anak-anak tercinta yang selalu ada saat suka maupun duka yang senantiasa mendampingi, serta teman-teman perkuliahan dan Dosen, Pegawai Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau beserta rekan kerja yang selalu menolong ataupun mensupport kepada saya sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

LEMBAR TUNJUK AJAR

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَ مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَ مَنْ أَرَادَ رَوَاهُ الطَّبْرَانِي هُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

Artinya: “Barangsiapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat maka itupun harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka itupun harus dengan ilmu” (HR. Thabrani).

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Defi Chinthia Putri
Tempat/Tanggal Lahir : Bangkinang, 15 Oktober 1982
Alamat : Jl. Letnan Boyak RT/RW 003/011 Kelurahan Langgini
Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar
Nomor Handphone : 081378256999
Nama Orang Tua : defi_chinthiaputri@yahoo.co.id
Ayah : Herfian
Ibu : Dahlinar
Nama Suami : Taufiq
Nama Anak : Khalila Tadechi Putrid an Raihanah Tadechi

Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 002 Muara Mahat 1988-1994
SMP : SMP Negeri 7 Bangkinang 1994-1997
SMA : SMA Negeri 1 Bangkinang 1997-2000
S1 : Universitas Bung Hatta Padang 2000-2004

Riwayat Pekerjaan

2005-2006 : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar
2006-2013 : Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Kampar
2013-2017 : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kab.
Kampar
2017-Sekarang : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten
Kampar

**ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM
INDUSTRIES AT THE INDUSTRY AND LABOR OFFICE OF KAMPAR
REGENCY
(STUDY OF BLACKSMITH CRAFTSMEN IN RUMBIO JAYA DISTRICT)**

ABSTRACT

BY : DEFI CHINTHIA PUTRI

Development of Small and Medium Industries in their development with the aim of improving the community's economy including blacksmith craftsmen in Rumbio Jaya sub-district by providing guidance by the Kampar Regency Industry and Labor Office which cover : Give direction, give guidance, supervise, provide education and training and give guidance. The purpose of this study was to determine the Implementation of the Development of Small and Medium Industries of Blacksmiths in the District of Rumbio Jaya by the Department of Industry and Labor of Kampar Regency and to know the obstacles in the Implementation of the Development of Small and Medium Industries of Blacksmiths in Rumbio Jaya District by the Department of Industry and Labor of Kampar Regency. The research method used is a quantitative method. The results of the research of the Development of Small and Medium Industries Blacksmiths in Rumbio Jaya District by the Department of Industry and Labor of Kampar Regency through five indicators are in the category "Pretty good" where it is known that the Implementation of the Development of Small and Medium Industries Blacksmiths in Rumbio Jaya District by the Department of Industry and Labor of Kampar Regency has not been carried out to the maximum through providing coaching in the form of materials, practical activities and marketing. The conclusion of the research is that the fostering activities on the blacksmith business ownership have not provided knowledge of business development on the ownership of the business. However, the authors suggest that the Department of Industry and Labor of Kampar Regency increase the number of officers in conducting coaching, increase the time of coaching activities and supervise the blacksmith's business activities and establish cooperation with blacksmith ownership in developing the blacksmith business.

Keywords: Coaching, Tasks, Blacksmith Craftsmen.

**ANALISIS PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN
KAMPAR
(STUDI PENGRAJIN PANDAI BESI DI KECAMATAN RUMBIO JAYA)**

ABSTRAK

OLEH : DEFI CHINTHIA PUTRI

Pembangunan Industri Kecil Dan Menengah dalam pengembangannya dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat antara lain Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya dengan memberikan pembinaan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar yang meliputi : Memberi pengarahan, Memberi bimbingan, Melakukan pengawasan, Memberikan pendidikan dan pelatihan dan Memberi buku petunjuk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya oleh Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar serta mengetahui hambatan Pelaksanaan Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya oleh Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian Pelaksanaan Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya oleh Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar melalui lima indikator berada pada katagori “Cukup Baik” dimana bahwa Pelaksanaan Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya oleh Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar belum terlaksana dengan maksimal melalui pemberian pembinaan dalam bentuk meteri, kegiatan praktek dan pemasaran. Kesimpulan penelitian bahwa kegiatan pembinaan terhadap Kepemilikan usaha Pandai Besi belum memberikan pengetahuan akan pengembangan usaha terhadap kepemilikan usaha tersebut. Namun penulis menyarankan agar Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar menambah jumlah petugas didalam melakukan pembinaan, menambah waktu kegiatan pembinaan dan melakukan pengawasan akan kegiatan usaha pandai besi serta menjalin kerjasama dengan kepemilikan pandai Besi didalam pengembangan Usaha Pandai Besi tersebut.

Kata Kunci : Pembinaan, Tugas, Pengrajin Pandai Besi.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Tesis ini dapat penulis selesaikan.

Tesis yang berjudul. “Analisis Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya).” **ini penulis tulis dan ajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Magister strata dua.**

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Tesis ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Tesis ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. **Orang tua, suami, anak dan seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan baik secara moril dan**

materil kepada saya untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu.

2. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
3. Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada pasca **sarjana Universitas Islam Riau yang beliau pimpin.**
4. Ketua Program studi Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si. **yang juga turut memberikan pengarahan kepada penulis dan yang selalu sabar mengarahkan dan membantu penulis selama menjalani studi.**
5. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu, tenaga dan fikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak Dr. H. Nurman,. S. Sos., M.Si. selaku pembimbing II yang memberikan arahan. Bimbingan dan masukan kepada penulis dan selalu mendukung dan mengingatkan penulis apabila lalai dalam penyelesaian Tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

8. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha Pasca Sarjana Universitas Islam Riau serta Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan Administrasi surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Tesis ini.
9. Informan dari Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar yang telah meluangkan waktu memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penyelesaian Tesis ini.
10. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan XXI yang selalu saling memberi semangat dan bantuan kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik Beliau semua dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal, Amin...

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu perngetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa dan dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Wabillahitaufik wal hidayah, wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru,
Penulis

Defi Chinthia Putri

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP PENULIS	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	19
1.3 Rumusan Masalah.....	20
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	20
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN	
2.1 Kajian Pustaka	22
2.1.1 Konsep Pemerintahan.....	22
2.1.2 Konsep Organisasi Pemerintahan.....	28
2.1.3 Tugas dan Fungsi Pemerintahan.....	32
2.1.4 Konsep Sumber Daya Manusia	38
2.1.5 Konsep Peranan	40
2.1.6 Konsep Pembinaan	51
2.1.7 Konsep Ekonomi	54
2.1.8 Konsep Pembangunan	55

2.2 Kerangka Pemikiran	63
2.3 Konsep Operasional	64
2.4 Operasional Variabel	66
2.5 Teknik Pengukuran	67

BAB III: METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian	70
3.2 Lokasi Penelitian.....	70
3.3 Populasi dan Sampel	71
3.4 Teknik Penarikan Sampel	72
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	72
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	73
3.7 Teknik Analisis Data	75
3.8 Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	75

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Identitas Responden.....	79
4.2 Hasil Penelitian	81
4.3 Analisis Data.....	84
4.1.1 Memberi Pengarahan.....	84
4.1.2 Memberi Bimbingan.....	89
4.1.3 Melakukan Pengawasan	93
4.1.4 Memberikan Pendidikan dan Pelatihan.....	97
4.1.5 Memberi Buku Petunjuk	102
4.4 Hambatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya)	109

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	112
5.2 Saran.....	113

DAFTAR PUSTAKA	115
-----------------------------	------------

DAFTAR LAMPIRAN	118
------------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Usaha/Perusahaan Industri Kecil dan Menengah Non formal Tahun 2019	8
Tabel 1.2	Jumlah Usaha Pandai Besi di Kabupaten Kampar Tahun 2019	9
Tabel 1.3	Usaha Industri Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya Tahun 2019	10
Tabel 1.4	Data Pembinaan dan pelatihan Usaha Industri Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tahun 2019	16
Tabel 2.1	Operasional Variabel penelitian tentang Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Kerajinan Industri)	66
Tabel 3.1	Populasi dan Sampel Penelitian di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar	71
Tabel 3.2	Jadwal Pelaksanaan Penelitian	75
Tabel 4.1	Klasifikasi Responden Analisis Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya) Berdasarkan Jenis Kelamin	80
Tabel 4.2	Klasifikasi Responden Analisis Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya) Berdasarkan Umur	80
Tabel 4.3	Klasifikasi Responden Penelitian Analisis Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya) Berdasarkan Tingkat Pendidikan	81
Tabel 4.4	Jawaban Responden Mengenai Indikator Memberi pengarahan dalam Analisis Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya)	85
Tabel 4.5	Jawaban Responden Mengenai Indikator Memberi bimbingan dalam Analisis Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar	

	(Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya)	90
Tabel 4.6	Jawaban Responden Mengenai Indikator Memberi pengawasan Dalam Analisis Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya)	94
Tabel 4.7	Jawaban Responden Mengenai Indikator Memberikan pendidikan dan pelatihan dalam Analisis Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya)	98
Tabel 4.8	Jawaban Responden Mengenai Indikator Memberi Memberi buku petunjuk dalam Analisis Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya)	103
Tabel 4.9	Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Analisis Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya)	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pembagian Urusan Pemerintah	3
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran Tentang Analisis Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya)	63

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Hasil Rekapitulasi Telly Jawaban Responden tentang Analisis Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya)..... 118
- Lampiran 2 Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Analisis Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya) 119

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (1) “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

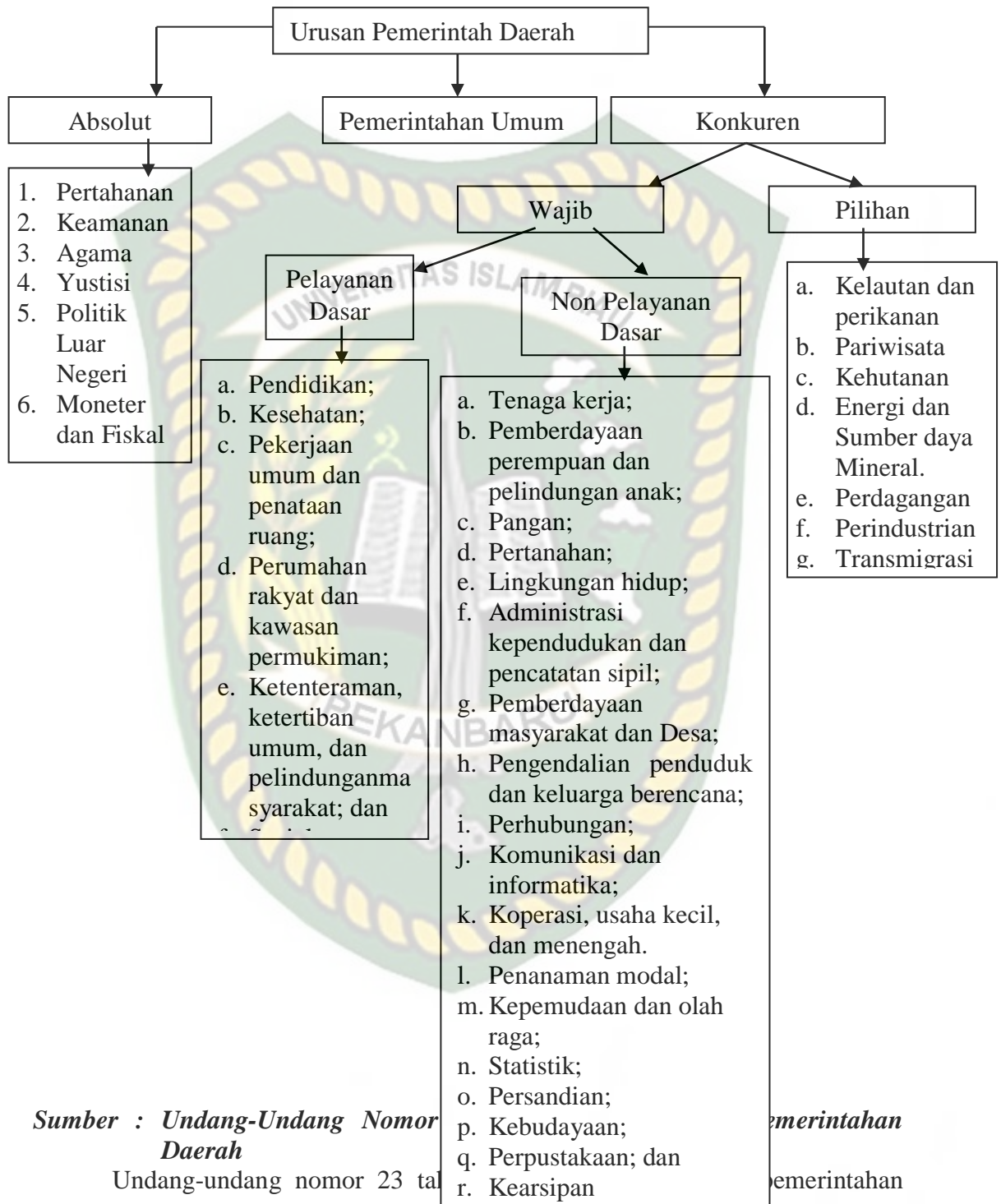
Tujuan utama dibentuknya Negara adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mencapai tujuan Negara tersebut, maka diselenggarakan pemerintahan Negara Indonesia. Untuk mencapai keefektifan penyelenggaraan pemerintah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal (18) ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-

daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Sesuai dengan kedudukan Pemerintah Daerah dan Desa dalam pasal 18B yaitu, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Berikut menggambarkan pembagian urusan pemerintahan.

Gambar 1.1: Pembagian Urusan Pemerintahan



Sumber : Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

terdiri dari 3 urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum dimana urusan Konkuren sebagai urusan

pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Dimana pada pasal 12 Point (3) disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.¹

Industri mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Mengingat peranannya dalam pembangunan, industri kecil harus terus dikembangkan dengan semangat kekeluargaan, saling isi mengisi, saling memperkuat antara usaha kecil dan besar dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan iklim usaha.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian bahwa industry mengandusk seluruh aspek bentuk kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan baku/ atau manfaat sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi termasuk jasa industri dimana dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah dalam

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

penyelenggaraan perindustrian dengan tujuan tertatanya pergerakan industri ditegah masyarakat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi mayarakat.

Pentingnya peranan industri kecil dalam mengembangkan perekonomian nasional ditunjukkan dengan ditetapkannya Peraturan dalam negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian izin Usaha Mikro dan Kecil. Dalam Permendagri ini diatur bahwa pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan yang seluas-luasnya, dan pemberian izin usaha sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.²

Salah satu Daerah yang menyelenggarakan Urusan Perindustrian adalah pemerintah Kabupaten Kampar dengan Luas Wilayah 10.928,20 KM², dengan, jumlah Kecamatan sebanyak 21, Desa/Kelurahan sebanyak 207, serta jumlah penduduk sebanyak 688.204 Jiwa. Sehubungan dengan strategi dan pentingnya pengembangan Industri Kecil di Kabupaten Kampar maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui Peraturan Bupati Kampar Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.

² Peraturan dalam negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian izin Usaha Mikro dan Kecil

Industri kecil dan menengah di Kabupaten Kampar mempunyai peranan yang sangat strategis, baik dalam pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan penyebaran lokasi industri yang mendukung pembangunan, pemerataan kesempatan kerja, dan bertujuan untuk membentuk masyarakat industri kecil yang mandiri, tangguh, dan berkembang menjadi industri besar.

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam pengembangannya dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis pembinaan melalui tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dimana pasal 3 bahwa Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. Bidang Pengembangan Potensi Industri terdiri dari:
 - a. Seksi Pendataan Potensi dan Pelaporan Industri;
 - b. Seksi Perizinan dan Pengawasan Industri.
4. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan IKM Aneka Industri;
 - b. Seksi Pembinaan IKM Sandang dan Pangan.
5. Bidang Pengembangan dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Informasi, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
6. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial;
 - b. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial;
 - c. Seksi Pengawasan Perlindungan dan Perizinan Tenaga Kerja.

Dari uraian tugas Dinas Perindustrian dan Menengah Kabupaten Kampar salah satunya adalah Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan tugas pokok sebagaimana diatur pada Pasal 14 meliputi :

- a. Menghimpun dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di seksi Pembinaan dan Pengembangan IKM Aneka Industri dan Kerajinan;
- c. Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan, standarisasi industri dan teknologi industri, peningkatan daya saing, penumbuhan wirausaha, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan industri menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, serta elektronika dan telematika;
- d. Memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap pelaku usaha industri dan kerajinan untuk meningkatkan dan pengembangan industri;
- e. Menyusun rencana dan bahan pembinaan Aneka industri dan kerajinan;
- f. Menyusun strategi perencanaan pemasaran dan promosi produk Aneka Industri dan Kerajinan;
- g. Mempersiapkan dan merencanakan industri agar bisa mengakses bantuan modal baik melalui PEMDA, BANK, BUMN, BUMD maupun Perusahaan swasta;
- h. Menginventarisasi potensi dan permasalahan yang ada seksi Aneka Industri dan Kerajinan sebagai dasar untuk pengembangan IKM;
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang pembinaan dan pengembangan Industri kecil menengah.

Dari uraian tugas Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah adalah memberikan bimbingan dan pengembangan terhadap Industri Kecil dan Menengah. Adapun kebijakan kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar menetapkan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah adalah sebagai strategis dalam rangka mendorong usaha kecil dan menengah tersebut dan berkembang dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan.

Untuk jelasnya dimana jumlah Usaha/Perusahaan Industri Kecil dan Menengah Non formal di Kabupaten Kampar sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Usaha/Perusahaan Industri Kecil dan Menengah Non formal 2019

No	Kecamatan	Usaha/Perusahaan Industri Kecil dan Menengah Non formal
1	Bangkinang Kota	241 Usaha
2	Bangkinang	125 Usaha
3	Kuok	158 Usaha
4	Koto Kampar Hulu	25 Usaha
5	Kampar	335 Usaha
6	Rumbio Jaya	183 Usaha
7	Kampar Utara	123 Usaha
8	Tambang	196 Usaha
9	Siak Hulu	252 Usaha
10	Kampar Kiri Hilir	104 Usaha
11	Kampar Kiri tengah	223 Usaha
12	Gunuh Sahilan	67 Usaha
13	Kampar Kiri Hulu	12 Usaha
14	Kampar Kiri	124 Usaha
15	Kampa	113 Usaha
16	Perhentian Raja	173 Usaha
17	XIII Koto Kampar	133 Usaha
18	Tapung Hilir	308 Usaha
19	Tapung Hulu	218 Usaha
20	Salo	55 Usaha
21	Tapung	332 Usaha
Jumlah		3461 Usaha

Sumber :Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, 2019

Berdasarkan tabel diatas Usaha/Perusahaan Industri Kecil dan Menengah Non formal di Kabupaten Kampar meliputi usaha Industri dan Industri Pangan dengan jumlah 3461 usaha dari setiap kecamatan dengan jumlah usaha paling banyak di Kecamatan Kampar dan yang paling sedikit Kampar Kiri Hulu. Pembinaan yang telah berlangsung oleh Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dengan memberikan pembinaan disetiap Kecamatan dalam

kelayakannya sesuai dengan tingkat Industri yang akan dibenahi dalam hal penelitian ini berlangsungnya pembinaan di Kecamatan Rumbio Jaya.

Kabupaten Kampar dengan luas Wilayah 10.928,20 KM² Kecamatan sebanyak 21, Desa/Kelurahan sebanyak 207, serta jumlah penduduk sebanyak 688.204 Jiwa. Dari sebanyak penduduk itu berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdapat sebanyak 3461 Usaha Kecil dan Menengah.

Adapun penelitian ini diadakan di Kecamatan Rumbio Jaya dimana Kecamatan Rumbio Jaya mempunyai luas wilayah administrasi ±78.42 km² dengan jumlah penduduk berjumlah 23.358 jiwa yang terdiri dari 11.704 jiwa laki-laki dan 11.664 jiwa perempuan. Hal ini Kecamatan Rumbio Jaya termasuk kecamatan yang padat penduduk dan memiliki usaha Industri Kerajinan yang erat dengan Pandai Besi sehingga perlu adanya pembinaan guna pencapaian keberhasilan setiap usaha Pandai Besi.

Usaha Industri Pandai Besi di Kabupaten Kampar terlihat sudah mulai berbaur di setiap kecamatan tentunya hal ini menjadi tugas pemerintah setempat didalam meningkatkan laju pertumbuhan usaha Industri Pandai besi, adapun berikut jumlah usaha industri pandai Besi di kabupaten Kampar sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Usaha Pandai Besi di Kabupaten Kampar 2019

No	Kecamatan	Usaha Pandai Besi
1	Bangkinang Kota	-
2	Bangkinang	-
3	Kuok	-
4	Koto Kampar	1 Usaha
5	Kampar	1 Usaha
6	Rumbio Jaya	80 Usaha
7	Kampar Utara	-
8	Tambang	-
9	Siak Hulu	-

10	Kampar Kiri Hilir	-
11	Kampar Kiri tengah	-
12	GunuhSahilan	-
13	Kampar Kiri Hulu	-
14	Kampar Kiri	3 Usaha
15	Kampar Timur	-
16	Perhentian Raja	1 Usaha
17	XIII Koto Kampar	-
18	TapungHilir	-
19	Tapung Hulu	1 Usaha
20	Salo	-
21	Tapung	4 Usaha
Jumlah		91 Usaha

Sumber : Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, 2019.

Berdasarkan tabel diatas jumlah usaha industri pandai besi di Kabupaten Kampar hanya dilakukan 7 Kecamatan dimanajumlah usaha yang paling banyak berada pada Kecamatan Rumbio Jaya sebanyak 80 Usaha, tentunya peran pemerintah dibutuhkan dalam pengembangan usaha tersebut.

Pelaksanaan Usaha Industri Kerajinan di Kecamatan Rumbio Jaya melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampardengan memberikan pembinaan pelatihan disetiap kerajinan industriPandai Besi secara luas. Adapun Pembinaan pelatihan terhadap Kerajinan Usaha Industri Pandai Besidapat diketahui melalui tabel dibawa ini :

Tabel 1.3 Usaha/Perusahaan Industri Kecil dan Menengah Non formal di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar

No	Desa/Kelurahan	Usaha/Perusahaan	Bentuk Badan Usaha	Komoditi/Produk
1	2	3	4	5
1		Tunas Baru	KLP	Alat Tani
2		Pandai Besi	PO	Alat Tani
3		Pandai Besi	PO	Alat Tani
4		Pandai Besi	PO	Alat Tani
5		Pandai Besi	PO	Alat Tani
6		Pandai Besi	PO	Alat Tani
7		Pandai Besi	PO	Alat Tani
8		Pandai Besi	PO	Alat Tani

1	2	3	4	5
9		Pandai Besi	PO	Alat Tani
10		Pandai Besi	PO	Alat Tani
11		Pandai Besi	PO	Alat Tani
12		Pandai Besi	PO	Alat Tani
13		Pandai Besi	PO	Alat Tani
14		Pandai Besi	PO	Alat Tani
15		Pandai Besi	PO	Alat Tani
16		Pandai Besi	PO	Alat Tani
17		Pandai Besi	PO	Alat Tani
18		Pandai Besi	PO	Alat Tani
19		Pandai Besi	PO	Alat Tani
20		Pandai Besi	PO	Alat Tani
21		Pandai Besi	PO	Alat Tani
22		Pandai Besi	PO	Alat Tani
23		Pandai Besi	PO	Alat Tani
24		Pandai Besi	PO	Alat Tani
25		Pandai Besi	PO	Alat Tani
26		Pandai Besi	PO	Alat Tani
27		Pandai Besi	PO	Alat Tani
28		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
29		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
30		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
31		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
32		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
33		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
34		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
35		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
36		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
37		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
38		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
39		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
40		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
41		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
42		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
43		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
44		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
45		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
46		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
47		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
48		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
49		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
50		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
52		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
52		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
53		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
54		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
55		Pandai Besi	KLP	Alat Tani

1	2	3	4	5
56		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
57		Tunas Baru	KLP	Alat Tani
58		Pandai Besi	PO	Alat Tani/Bangunan
59		Pandai Besi	PO	Alat Tani/Bangunan
60		Anyaman Bambu	PO	Anyaman Bambu
61		Anyaman Bambu	PO	Anyaman Bambu
62		Anyaman Bambu	PO	Anyaman Bambu
63		Anyaman Bambu	PO	Anyaman Bambu
64		Bengkel Las	PO	Bengkel Las
65		Bengkel Las	PO	Bengkel Las
66		Bengkel Las	PO	Bengkel Las
67		Bengkel Las	PO	Bengkel Las
68		Lestari	PO	Bengkel Las
69		Kerupuk Jengkol	PO	Kerupuk Jengkol
70		Kerupu Ubi	PO	Kerupu Ubi
71		Kerupu Ubi	PO	Kerupu Ubi
72		Bengkel Honda	PO	Reparasi Sepeda Motor
73		Putra Motor	PO	Reparasi Sepeda Motor
74		Tujin dan Kerupuk Lado	PO	Tujin
75		Tujin dan Kerupuk Lado	PO	Tujin
76		Tujin dan Kerupuk Lado	PO	Tujin
	Pulau Payung			
1		Jasa Baja	KLP	Alat Tani
2		Jasa Baja	KLP	Alat Tani
3		Jasa Baja	KLP	Alat Tani
4		Jasa Baja	KLP	Alat Tani
5		Samurai	KLP	Alat Tani
6		Samurai	KLP	Alat Tani
7		Samurai	KLP	Alat Tani
8		Samurai	KLP	Alat Tani
9		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
10		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
11		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
12		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
13		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
14		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
15		Pandai Besi	KLP	Alat Tani
16		Jasa Baja	KLP	Alat Tani/Bangunan
17		Prabot	PO	Almari
18		Bordir	PO	Gorden
19		Kerupuk Ubi	PO	Kerupu Ubi
20		Pengetaman	PO	Konsen
21		Penjahit	PO	Pakaian
22		Penjahit	PO	Pakaian

1	2	3	4	5
23		Penjahit	PO	Pakaian
24		Penjahit	PO	Pakaian
25		Penjahit	PO	Pakaian
26		Penjahit	PO	Pakaian
27		Penjahit	PO	Pakaian
28		Penjahit	PO	Pakaian
29		Penjahit	PO	Pakaian
30		Penjahit	PO	Pakaian
31		Pengetaman	PO	Pintu
32		Pandai Kayu	PO	Tangkai Cankul
33		Terali	PO	Terali
	Alam Panjang			
1		Anyaman	PO	Aneka Anyaman
2		Aneka Kue	PO	Aneka Kue
3		Aneka Kue	PO	Aneka Kue
4		Anyaman	PO	Anyaman
5		Anyaman	PO	Anyaman
6		Anyaman	PO	Anyaman
7		Anyaman	PO	Anyaman
8		Dodol	PO	Dodol
9		Keripik Kentang	PO	Keripik Kentang
10		Keripik Ubi	PO	Keripik Ubi
11		Keripik Ubi	PO	Keripik Ubi
12		Keripik Ubi	PO	Keripik Ubi
13		Keripik Ubi	PO	Keripik Ubi
14		Keripik Ubi	PO	Keripik Ubi
15		Keripik Ubi	PO	Keripik Ubi
16		Keripik Ubi	PO	Keripik Ubi
17		Keripik Ubi	PO	Keripik Ubi
18		Kue Basah	PO	Kue Basah
19		Kue Bawang	PO	Kue Bawang
20		Kue Donat	PO	Kue Donat
21		Kue Pilin	PO	Kue Pilin
22		Tahu	PO	Tahu
	Bukit Keratai			
1		Tempe	PO	Tempe
2		Kripik Kentang	PO	Keripik
3		Membuat Toge	PO	Membuat Toge
4		Rengginang	PO	Rengginang
5		Bakpao	PO	Bakpao
6		Tape	PO	Tape
7		Tahu	PO	Tahu
8		Keripik dan Peyek		Keripik

1	2	3	4	5
	Batang Batindih			
1		Bronis Kukus	PO	Kue Basah
2		Penjahit Mitra Ocu	PO	Pakaian
3		Pembuatan Tempe	PO	Tempe
4		Abenk Las	PO	Pagar/trail
5		Jamu	PO	Jamu
6		UD. Jaya Motor	UD	Kendaraan Roda Dua
7		Sari Murni	PO	Tempe
8		Aqiela Snack	PO	Kue Basah
9		Ari Perabot	PO	Konsen,Pintu,Jendela
	Tambusai			
1		Sejahtera	PO	Pupuk Organik
2		Pandai Besi	PO	Pandai Besi
3		Pandai Besi	PO	Pandai Besi
4		Pandai Besi	PO	Pandai Besi
5		Berkah	PO	Kerajinan tahu
6		Karya Abadi	PO	Bengkel Las
7		Pandai Besi	PO	Alat Tani
8		Kerupuk	PO	Kerupuk
9		Penjahit	PO	Pakaian
10		Penjahit	PO	Pakaian
11		Penjahit	PO	Pakaian
12		Bengkel Motor	PO	Bengkel Motor
13		Bengkel Motor	PO	Bengkel Motor
14		Meubeler	PO	Meubeler
15		Kerupuk	PO	Kerupuk
16		Penjahit	PO	Pakaian
17		Penjahit	PO	Pakaian
18		Penjahit	PO	Pakaian
19		Penjahit	PO	Pakaian
20		Penjahit	PO	Pakaian
21		Penjahit	PO	Pakaian
22		Penjahit	PO	Pakaian
23		Penjahit	PO	Pakaian
24		Penjahit	PO	Pakaian
	Simpang Petai			
1		Metro prabot	PO	Kunsen, Pintu
2		PB. Super Baja	PO	Parang
3		PB. Supardi Pir	PO	Parang
4		Sampul Parang	PO	Sampul Parang
5		Rahma Jaya	PO	Sampul Parang
6		Suka Maju	PO	Sampul Parang
7		Sampul Parang	PO	Sampul Parang
8		Pandai Besi	PO	Parang
9		Pakaian	PO	Baju Jadi

1	2	3	4	5
10		Kerupuk ubi	PO	Kerupuk Ubi
11		Terali	PO	Terali Besi Pagar

Sumber :Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, 2019

Berdasarkan tabel diatas Usaha/Perusahaan Industri Kecil dan Menengah Non formal di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dengan Jumlah Usaha sebanyak 73. Hal ini terlihat bahwa usaha yang paling banyak adalah Usaha Industri Kerajinan Pandai Besi sebanyak 26 usaha sehingga Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar megنupayakan memberikan pembinaan dan pelatihan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan hasil kerajinan.

Pembinaan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar tidak terlepas dari program kegiatan yang secara langsung dilaksanakan dengan tujuan tercapainya kinerjaDinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dalam pencapaian pembinaan pelatihan bagi setiap Industri padai Besi. Adapun program kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar terhadap Industri padai Besi dalam kurun tahun 2016 sampai dengan 2019 sebagai berikut:

1. Melakukan Pendataan setiap Industri Usaha Pandai Besi;
2. Penetapan Pembinaan dan Pelatihan bagi setiap Industri Usaha Pandai Besi;
3. Waktu Pembinaan dan Pelatihan selama 5 (lima) Hari;
4. Pemasaran dan Promosi Produk Industri Usaha Pandai Besi;

Bentuk Pembinaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar terhadap usaha Pandai Besi meliputi:

1. Cara pembuatan;
2. Kualitas;
3. Keterampilan;
4. Pemasaran;

Upayah pembinaan dan pelatihan yang diberikan terhadap Usaha industri Pandai Besi tidak secara menyeluruh menerima pembinaan pelatihan melainkan sebagian sehingga menimbulkan tidak semua usaha Pandai Besi menerima bantuan dan pengetahuan yang lebih baik dalam mengelola usaha Pandai Besi. Adapun berikut Data Pembinaan Usaha Kecil Menengah Pandai Besi sebagai berikut :

Tabel 1.4 Data Pembinaan dan pelatihan Usaha/Perusahaan Industri Kecil dan Menengah Non formal di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar

No	Desa/Kelurahan	Usaha/Perusahaan	Nama Pemilik	Mengikuti pembinaan Pelatihan
1	2	3	4	5
	Teratak			
1		Pandai Besi	Mawardi	√
2		Pandai Besi	Doni Syaputra	√
3		Pandai Besi	Amirudin	√
4		Pandai Besi	Deswandi	-
5		Pandai Besi	Abu Nawar	-
6		Pandai Besi	Mansyur s	-
7		Pandai Besi	Asri Usolli	-
8		Pandai Besi	Hamza	√
9		Pandai Besi	Dedi	√
	Pulau Payung			
11		Pandai Besi	Lizar	√
12		Pandai Besi	Hadinur	√
13		Pandai Besi	Masnur	√
14		Pandai Besi	Parul	-
15		Pandai Besi	Isam	√
16		Pandai Besi	Bahar	√
17		Pandai Besi	Basri	-
18		Pandai Besi	Pilusman	√
19		Pandai Besi	Yuli	√
20		Pandai Besi	Herman	-
21		Pandai Besi	Sukarno	-
22		Pandai Besi	Robv	-
	Alam Panjang			
23		Pandai Besi	Dodi	√
24		Pandai Besi	Hariato	√
25		Pandai Besi		-

1	2	3	4	5
	Tambusai			
26		Pandai Besi	Asran Siregar	√
27		Pandai Besi	Agus	√
28		Pandai Besi	Sugito	-
29		Pandai Besi	Ruminto	-
30		Pandai Besi	Adrianto	-

Sumber :Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, 2018

Berdasarkan tabel diatas Pembinaan dan pelatihan Usaha/Perusahaan Industri Kecil dan Menengah Non formal di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar yang diberikan terhadap Usaha Industri Pandai Besi terlihat yang menerima pembinaan dan pelatihan meliputi Desa Teratak dengan jumlah usaha Kerajinan Pandai Besi sebanyak 9 usah sedangkan yang menerima pembinaan dan pelatihan sebanyak 5 Usaha, Desa Pulau Payung dengan jumlah Usaha Industri Pandai Besi sebanyak 12 usaha sedangkan yang menerima pembinaan dan pelatihan sebanyak 7 Usaha, Desa Alam Panjang dengan jumlah Usaha Kerajinan Pandai Besi sebanyak 3 usaha sedangkan yang mengikuti pembinaan dan pelatihan sebanyak 2 Usaha, Desa Tambusai dengan Usaha Kerajinan Pandai Besi sebanyak 5 usaha sedangkan yang menerima pembinaan dan pelatihan sebanyak 2 usaha. Bedasarkan penjelasan tabel diatas terlihat bahwa masih banyak usaha kerajinan yang belum menerima pembianan serta pelatihan sehingga menimbulkan kurangnya pengetahuan serta hasil isdutri usaha Pandai Besi sehingga menimbulkan ketertinggalan dalam hasil produksi dan berdampak tidak meningkatkan produksi hasil usaha Pandai Besi oleh masyarakat sehingga hal ini perlunya Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar lebih peka terhadap kebijakan yang akan diterapkan dalam upaya meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat Desa.

Berkenaan dengan upaya pembinaan Industri Kecil Dan Menengah di Kabupaten Kampar perlu dilakukan pembinaan sesuai bidang usaha yang dijalankan selama ini. Disamping itu perlunya pengembangan kemampuan sumber daya manusia, karena melalui pembinaan tersebut diharapkan berkembangnya usaha industri kecil dan menengah di Kabupaten Kampar. Dalam upaya pembinaan industri kecil dan menengah memang diperlukan suatu langkah yang tepat sehingga permasalahan yang mengemuka dapat teratasi, dan harapan para pengusaha industri kecil dan menengah untuk sejahtera dapat terealisasi.

Pelaksanaan Pembinaan Pandai Besi diketahui masih banyak kepemilikan Industri terdata belum dilakukan pembinaan, dimana diketahui dari 30 Usaha Pandai Besi 16 usaha Pandai Besi yang mengikuti kegiatan pembinaan, belum terselenggaranya waktu yang ditetapkan didalam pembinaan pelatihan sesuai ketetapan pelaksanaan kegiatan selama 5 hari melainkan kenyataannya sampai 3 hari, dan petugas pelaksana pembinaan pelatihan diketahui belum memiliki kemampuan wawasan yang lebih baik dari kepemilikan usaha sehingga pemberian pembinaan pelatihan belum memberikan wawasan kemampuan bagi kepemilik usaha, serta belum adanya evaluasi yang dilakukan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar terkait bentuk atau upayah-upayah didalam pengembangan pembinaan pelatihan didalam meningkatkan pegetahuan kepemilikan industry tersebut.

Pembinaan Permasalahan mendasar untuk sektor industri kecil dan menengah di Kabupaten Kampar adalah seringnya terhambat dengan keterbatasan modal, SDM yang masih kurang mampu, kesulitan untuk mendapatkan bahan

baku, dan sulitnya pemasaran khususnya produk kerajinan. Oleh karena itu perlu adanya terobosan-terobosan yang diperlukan dalam pengembangannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar belum terlaksana dengan baik, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besidi Kecamatan Rumbio Jaya)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Pembinaan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar belum memberikan pembinaan dan pelatihan terhadap usaha Pandai Besi sehingga masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bagaimana dalam meningkatkan pengetahuan usaha kerajinan Pandai Besi agar bisa bersaing dipasar dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pembinaan pelatihan yang diberikan terhadap Usaha Kerajinan Pandai Besi dalam hal sumber Daya pengajar secara luas masih belum memiliki pengetahuan yang lebih baik sehingga kepemilikan usaha hanya dibekali pelatihan pembinaan dan kebanyakan teori melainkan tidak diiringi peraktek sehingga menimbulkan dilemah kepemilikan usaha kerajinan kurang memahami dalam hal peraktek melainkan peraktek diadakan setelah teori secara menyeluruh selesai dan tidak adanya pengawasan oleh Dinas terkait berlangsungnya usaha Kerajinan

Pandai Besi ditegah masyarakat setelah diberikan pelatihan dan pembinaan sehingga usaha kerajinan Pandai Besi cenderung berjalan seperti biasanya.

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas kemudian penulis dapat merumuskan masalah yang perlu untuk dikajikan pembahasan penelitian. Adapun masalah yang dirumuskan dalam penelitian tesis ini adalah **“Bagaimanakah Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besidi Kecamatan Rumbio Jaya)”**.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya).
- b. Untuk mengetahui Hambatan Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya).

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

- a) Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi referensi kepustakaan Ilmu Pemerintahan dan bagi peneliti lainnya yang tertarik dalam bidang yang sama.
- b) Akademis: Untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan serta menerapkan segala ilmu yang telah diperoleh terutama dalam Pelaksanaan Pembinaan Kerajinan Industri.
- c) Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan pihak-pihak terkait dalam Pelaksanaan Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dalam Kerajinan Industri.

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Konsep Pemerintahan

Ilmu pemerintahan merupakan suatu proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat disebut pemerintah³.

Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu atau seni. Dikatakan sebagai seni karena ada beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan.⁴

Suryaningrat menyatakan bahwa pemerintah adalah perbuatan atau cara/urusan pemerintah, pemerintah yang adil dalam pemerintahan yang demografi. Sedangkan pemerintahan adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan kekuasaan atau dengan kata lain, pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang syah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perubahan dan keputusan⁵.

³Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat : Mempersiapkn Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 36

⁴Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 20

⁵ Bayu Suryaningrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Bina Aksara, 2001, hlm. 2

Untuk mengetahui pengertian pemerintahan maka harus juga dikenali istilah pemerintah. Untuk membedakan kedua pengertian tersebut, perlu diterangkan bahwa menurut arti etimologis (tata bahasa) maka :⁶

Pemerintah ialah kata nama subyek yang berdiri sendiri. Contoh : Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan sebagainya. Pemerintahan ialah kata jadian, yang disebabkan karena subyek mendapat akhiran “an”. Artinya Pemerintah sebagai subyek melakukan tugas/ kegiatan. Sedang cara melakukan tugas/kegiatan itu disebut sebagai pemerintahan. Tambahan akhiran “an” dapat juga diartikan sebagai bentuk jama atau dapat berarti lebih dari satu Pemerintah.

Oleh karena itu, didalam uraiannya selanjutnya yang mendapat sorotan ialah baik mengenai Pemerintah sebagai subyek maupun pemerintahan sebagai kegiatan terutama pemerintahan desa.

Pemerintah merupakan terjemahan kata “*government*” dari bahasa Inggris dan *Government* dari bahasa Perancis yang keduanya berasal dari bahasa Latin, yaitu *Gubernaculum*, yang berarti kemudi, tetapi diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi Pemerintah atau Pemerintahan dan terkadang juga menjadi penguasa.⁷

Menurut Taliziduhu Ndraha, pemerintahan adalah gejala social artinya terjadi didalam hubungan anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Gejala

⁶Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Pemerintah Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 19

⁷Hessel Nogi S, *Hukum Administrasi Negara; Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Good Governance*, Balairung, Yogyakarta, 2003, hlm. 34

itu terdapat pada suatu kelompok disebut (X) dalam proses atau interaksi social terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain (Y).⁸

Pemerintahan dimaknai sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan Negara.

Menurut Syaf'i bahwa pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syarat yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki obyek, baik obyek materi maupun formal, universal sifatnya, sistematis dan spesifik (khas). Pemerintahan berasal dari kata "pemerintah" tersebut memiliki empat unsur yaitu : ada dua pihak yang terakandung, kedua pihak tersebut memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.⁹

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk

⁸ Taliziduhu Ndraha, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 6

⁹ Inu Kencana Syafi'i, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 20

legislatif dan yudikatif. Pemerintahan merupakan lembaga atau badan publik yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, sedangkan pemerintahan adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara.¹⁰

Menurut Hadjon, bahwa birokrasi sebagai organisasi dengan ciri-ciri khusus, menjadi pusat perhatian para ahli berbagai disiplin ilmu social karena jasa Max Weber. Dalam karyanya *The Theory of Economy and Social Organization*, Weber mengemukakan konsepnya tentang *The Ideal Type of Bureaucracy* dengan merumuskan ciri-ciri pokok organisasi birokrasi yang lebih sesuai dengan masyarakat modern, yaitu : peranan birokrasi secara umum dikemukakan oleh Michael G. Roskin dan kawan-kawan mempunyai fungsi yang meliputi kegiatan-kegiatan pengadministrasian, pelayanan, peraturan, perizinan, pengumpulan informasi dan urusan rumah tangga. Seluruh birokrat pemerintahan menjalankan setidaknya dua dari fungsi dasar tersebut, dengan sebagian bekerja secara khusus pada biro tertentu dan sebahagian lagi menjalankan fungsi ganda.¹¹

Pemerintahan dimaknai sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang

¹⁰Dewanta Setya, Awan, dkk, *Asas-asas Pemerintahan yang Baik : Antara Konsep dan Aktualisasi*, Aditya Media, 2000, hlm. 23

¹¹Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Media Pressindo, Jakarta, 2002, hlm. 23

mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan Negara.¹²

Menurut Syafe'I pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Pemerintah adalah lembaga atau badan publik yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, sedangkan pemerintahan adalah lembaga atau badan-badan public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara.¹³

Dalam ilmu pemerintah, pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara dan menjalankan pemerintahan disebut pemerintah, secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan antara lain sebagai berikut :

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga Negara agar tidak terjadi pembontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keribuatn antar masyarakat, menjamin perubahan aparatur yang terjadi dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang yang melatarbelakangi keadaan mereka.

¹² Hessel Nogi, *op.cit.*, hlm. 134

¹³ Inu Kencana Syafe'i, *op.cit.*, hlm. 21

- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah atau akan lebih baik jika dikerjakan oleh Pemerintah.

Pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara. Adapun bentuk-bentuk Pemerintahan mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang berbasis pada kontitusi oligarki dan pemerintahan yang pada konstitusi demokrasi yaitu :¹⁴

1. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah pemerintah yang bersifat monarkis (*monarchy*), pemerintahan yang bersifat diktatoris (*dictatorship*), pemerintahan yang bersifat teokratis, dan pemerintahan yang bersifat pluraristik (*plural headship*).
2. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah konstitusi demokrasi (*democracy*) adalah system pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan system pemerintahan dengan pola republik. Dalam perkembangannya, system pemerintahan dengan pola republic semakin memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya bentuk-bentuk Pemerintahan demokrasi adalah limited monarcy kemudian berkembang menjadi pemerintahan republik.

Bentuk pemerintah pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan. Bentuk pemerintahan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk

¹⁴ Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh. Tahun 2015. Hal. 47.

mengorganisasikan suatu negara untuk menegaskan kekuasaannya atas suatu komunitas komunikasi politik.¹⁵

2.1.2 Konsep Organisasi Pemerintahan

Secara sederhana, organisasi adalah suatu kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan dan mau terlibat dengan peraturan yang ada. Organisasi adalah suatu wadah atau tempat untuk melakukan kegiatan bersama, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama dengan ciri¹⁶:

- a. Terdiri daripada dua orang atau lebih
- b. Ada kerjasama
- c. Ada komunikasi antar satu anggota dengan yang lain
- d. Ada tujuan yang ingin dicapai.

Musaneef memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan organisasi adalah keseluruhan daripada sumber-sumber baik yang bersifat manusia maupun yang non-manusia, serta pengelompokkan daripada tugas dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau dengan kata lain organisasi adalah ajang, jaringan tata kerjasama kelompok orang-orang secara teratur dan continue untuk mencapai tujuan-tujuan bersama yang telah ditentukan,

¹⁵ Munaf, Yusri. *Op, Cit.* Hal. 48

¹⁶ Ati Cahayani, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, PT Gramedia Widiasama, Jakarta, 2003, hal. 8

dimana didalamnya selalu terdapat tata cara dan hubungan antara atasan dan bawahan¹⁷.

Istilah organisasi menurut Nanang Fatah, memiliki dua pengertian umum yakni¹⁸:

- b. Organisasi sebagai lembaga atau kelompok fungsional seperti perusahaan, sekolah, perkumpulan atau badan-badan pemerintahan
- c. Merujuk pada proses pengorganisasian yaitu bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan diantara para anggota, sehingga tujuan organisasi tercapai secara efektif.

Suatu organisasi memiliki sedikitnya 3 tingkatan manajeral sebagaimana dikemukakan oleh Kartini Kartono mencakup¹⁹:

- a. Tingkatan institusional yang membahas hal-hal strategis
- b. Tingkatan manajerial, yang berkaitan dengan pengkoordinasian dengan bagian-bagian dalam organisasi
- c. Tingkatan operasinal, yang membahas pekerja

Apabila ditinjau dari adanya pembagian tugas kerja antara unsur pelaksana dan unsur bantuan maka digunakan dasar perorganisasian berdasarkan pendekatan staff dan sehingga ditingkat atas terlihat adanya pihak-pihak yang memberikan pelayanan teknis dan administratif. Menurut Gibson, organisasi dapat diartikan dalam dua macam; yaitu²⁰ :

¹⁷ Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2003, hlm. 27

¹⁸ Nanang Fatah, *Landasan Manajemen, Rosdakarya*, Bandung, 2003, hlm. 71

¹⁹ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 11

²⁰ Gibson James, *Organisasi Perilaku* (Terjemahan Nunuk Adiarni, Bina Aksara, Jakarta, 1997), hlm. 23

- a. Dalam arti statis yaitu organisasi sebagai wadah tempat dimana kegiatan kerjasama dijalankan
- b. Dalam arti dinamis yaitu organisasi sebagai suatu sistem proses interaksi antara orang-orang yang bekerjasama, baik formal maupun informal.

Menurut Ibnu Syamsi bahwa organisasi mempunyai kesamaan (sinonim) dengan beberapa hal berikut ini ²¹:

- a. Institusi/lembaga

Yaitu kelompok yang menampung aspirasi masyarakat; punya aturan tertulis atau tidak; tumbuh dalam masyarakat; mencapai tujuan bersama; dibentuk oleh pemerintah atau swasta

- b. Birokrasi

Administrasi dan manajemen; badan administrasi atau badan manajemen yaitu suatu badan yang menyelenggarakan suatu kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (baik dalam bidang pemerintahan maupun swasta) melalui sistem kerja yang berlandaskan suatu jaringan tata hubungan kerjasama sesuai dengan tata aturan dan prosedur yang ditentukan.

- c. Organisasi formal

Organisasi yang memiliki stuktur (bagan yang menggambarkan hubungan-hubungan kerja, kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab antara pejabat

²¹ Ibnu Syamsi, *Pokok-pokok Organisasi & Manajemen*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 126

dalam suatu organisasi). Suatu organisasi harus memuat 4 unsur utama, yaitu :

- 1) Berorientasi tujuan
 - 2) Sistem hubungan sosial
 - 3) *Structured Activities*
 - 4) *Technological System*
- d. Organisasi Publik

Organisasi publik adalah yang memiliki ciri-ciri :1). Organisasi yang terbesar, 2).Yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara, 3).Mempunyai kewenangan yang absah dibidang politik, administrasi pemerintahan dan hukum secara terlembaga, 4).Sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya 5).Melayani keperluannya 6).Sebaliknya berhak pula memungut pajak untuk pendaan 7) serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan.Organisasi public sering dilihat pada bentuk organisasi pemerintah yang dikenal sebagai birokrasi pemerintah (organisasi pemerintahan), atau satu-satunya organisasi didunia yang mempunyai wewenang merampok harta rakyat (pajak), membunuh rakyat (hukuman mati) dan memenjarakan rakyat.

Ada beberapa bentuk organisasi sesuai dengan karakter dan cirinya masing-masing. Menurut Kassau sebagai mana dikutip oleh Musanef, bahwa bentuk organisasi terdiri dari²² :

²² Musanef, *op.cit.*, hlm. 63

a) Organisasi Garis

Cirinya pimpinan tanpa staf pembantu dan adanya kesatuan komando, misalnya organisasi Militer : kompi kebawah

b) Organisasi staff/ Fungsi

Cirinya bawahan mendapat perintah dari beberapa pengawas yang bertanggungjawab kepada beberapa pengawas itu dalam bidangnya masing-masing misalnya organisasi perusahaan.

c) Organisasi Staff dan Garis

Cirinya pimpinan dibantu staff dan adanya kesatuan komando, staff mempunyai wewenang fungsional bantuan teknis, petunjuk hanya kepala/pimpinan mempunyai wewenang komando, misalnya : pemerintahan dan sebagai organisasi militer.

d) Organisasi Panitia

Cirinya pimpinan berbentuk panitia/dewan terdiri dari beberapa orang, segala keputusan diambil dalam rapat dan dipertanggungjawabkan secara bersama misalnya : Kelompok Kerja, Panitia Kerja atau langsung diberi nama Panitia.

2.1.3 Tugas dan Fungsi Pemerintahan

Kerangka pemikiran secara teoritis, Presiden atau Pemerintah memiliki dua kedudukan yaitu sebagai salah satu organ Negara dan sebagai administrasi Negara. Sebagai organ Negara, pemerintah bertindak untuk dan atas nama Negara. Sedangkan sebagai administrasi Negara, pemerintah dapat bertindak baik dalam lapangan pengaturan (*regelen*) maupun dalam lapangan pelayanan

(*besturen*). Penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah sebagai administrasi Negara, bukan sebagai organ Negara.²³

Didalam Negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan. Ketentuan bahwa setiap tindakan pemerintahan ini harus didasarkan pada asas legalitas, tidak sepenuhnya dapat diterapkan ketika suatu Negara menganut konsepsi *welfare state* seperti halnya Indonesia. Dalam konsepsi *welfare state*, tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Secara alamiah, terdapat perbedaan gerak antara pembuatan Undang-Undang dengan persoalan-persoalan yang berkembang dimasyarakat. Pembuatan undang-undang berjalan lambat, sementara persoalan kemasyarakatan berjalan dengan pesat. Jika setiap tindakan pemerintah harus selalu berdasarkan Undang-undang, maka akan banyak persoalan kemasyarakatan yang tidak dapat terlayani secara wajar. Oleh karena itu dalam konsepsi *welfare state*, tindakan pemerintah tidak selalu harus berdasarkan asas legalitas. Dalam hal-hal tertentu Pemerintah dapat melakukan tindakan secara bebas yang didasarkan pada *freies ermessen*, yakni kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan kepentingan umum.

²³*Ibid.*, hlm. 22

Pemerintahan menurut pengertian umum, dapat diartikan sebagai wewenang badan-badan/lembaga pemerintahan sebagai pejabat resmi untuk melaksanakan kegiatan pemerintah (*eksekutive power*). Kegiatan mana berarti pelaksanaan serta ditaatinya semua ketentuan pranata hukum dalam batas seluruh atau sebahagian wilayah Negara baik oleh masing-masing oknum warga Negara perseroan maupun secara kolektif oleh komponen-komponen pemerintahan maupun kemasyarakatan. Pranata hukum yang menjadi objek wewenang eksekutif terdiri atas peraturan perundang-undangan, peraturan Pemerintah Daerah Otonom serta ketentuan-ketentuan ketatausahaan Badan-badan atau lembaga pemerintah Pusat maupun daerah (peraturan organik).

Wewenang eksekutif tersebut ialah merupakan wewenang pemerintah Pusat yang diserahkan secara konstitusional kepada Sekretaris Negara atau Presiden yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Luas dan batas mengadakan mana meliputi antara lain sebagai berikut :

- a. Wewenang untuk mengadakan hubungan diplomatik, membuat perjanjian dan memaklumkan perang dengan Negara lain
- b. Memberikan grasi, abolisi dan rehabilitasi
- c. Melakukan kegiatan Pemerintahan dalam negeri ialah yang dimaksud dengan pemerintahan umum (*Algemene Bestuur*) yang pelaksanaan kewenangannya dikoordinir oleh Menteri atau Departemen Dalam Negeri dan selanjutnya dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah cq. Sekretaris Daerah.
- d. Melakukan kebijaksanaan pertahanan dan keamanan

- e. Melakukan kegiatan pemerintahan dalam bidang teknis dalam bentuk pemberian pelayanan umum dan pemeliharaan kepentingan vital warga masyarakat yang menjadi bidang tanggung jawab lembaga-lembaga departemental maupun non departemen.
- f. Melaksanakan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- g. Pembinaan administrasi Negara dan sebagainya.

Birokrasi terdapat didalam semua bidang kehidupan dan diperlukan oleh setiap organisasi formal. Birokrasi yang terdapat didalam organisasi formal yang memproses *public goods* dapat disebut dengan birokrasi publik. Seperti diketahui bahwa pemerintahan adalah proses penyediaan jasa public dan layanan civil bagi masyarakat dan bagi setiap orang. Karakteristik sifat-sifat produk yang disebut jasa public dan layanan civil sedemikian rupa sehingga hamper dalam semua hal, pemerintah mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat atau orang yang bersangkutan.²⁴

Menurut Taliziduhu Ndraha epistemology Keybernolgy bahwa setiap masyarakat dibentuk dan digerakkan oleh tiga subtkultur yaitu subkultur ekonomi, subkultur kekuasaan dan subkultur pelanggan. Interaksi antara ketiga subkultur itu disebut dengan pemerintahan (*governance*), dari kata pemerintah. Pemerintah adalah pelaku subkultur kekuasaan dan hanyalah salah satu diantara subkultur masyarakat. Tanpa ada subkultur lainnya, tidak terjadi

²⁴*Ibid.*, hlm. 519

pemerintahan.(Kepemerintahan berarti perihal pemerintah, sama seperti kepengurusan yang berarti pengurus.²⁵

Dalam teori organisasi pemerintahan, Taliziduhu Ndraha menyebutkan bahwa para ahli berkesimpulan bahwa Negara adalah organisasi kekuasaan. Kalangan statis berpendapat apa saja yang dilakukan oleh Negara itu adalah pemerintahan konstruksi pemikiran keybernologi menemukan hal-hal yang berbeda yaitu pemerintahan terdapat pada setiap unit social yang secara obyektif terdiri dari tiga subkultur yaitu subkultur ekonomi (SKE), subkultur kekuasaan (SKK) dan subkultur pelanggan. Dalam hubungan itu, pemikiran keybernologikal bertemu dengan pemikiran politik pada saat subkultur ekonomi membutuhkan kekuasaan untuk menegakkan aturan main proses peningkatan nilai sumber daya demi keadilan dan kedamaian umat manusia. Dilihat dari sudut substansial, pemerintahan adalah proses perlindungan dan pemenuhan kebutuhan manusia dan masyarakat akan layanan civil dan jasa publik didalam hubungan pemerintahan²⁶.

Pada Negara yang menganut ajaran trias politika, terdapat tiga kekuasaan yaitu legislative, Eksekutif dan Yudikatif. Supaya setiap warga Negara, bahkan setiap orang bias mengontrol ketiga macam kekuasaan bias menyentuh tiap orang, harus ada akses institusional timbale balik langsung dan tidak langsung antara kedua belah pihak, baik formal maupun non formal.²⁷

Kerangka pemikiran secara teoritis, presiden atau pemerintah memiliki dua kedudukan yaitu sebagai salah satu organ Negara dan sebagai administrasi

²⁵Taliziduhu Ndraha, *Keybernology; Kepamongprajaan*, Sirao Credentia Center, Jakarta, 2008, hlm. 56-57

²⁶Taliziduhu Ndraha, *Keybernology; Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 175-176

²⁷*Ibid.*, hlm. 176

Negara. Sebagai organ Negara, pemerintah bertindak untuk dan atas nama Negara. Sedangkan sebagai administrasi Negara, Pemerintah dapat bertindak baik dalam lapangan pengaturan (regelen) maupun dalam lapangan pelayanan (besturen). Penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah sebagai administrasi Negara. Bukan sebagai organ Negara.²⁸

Didalam suatu sistem pemerintahan negara, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan. Ketentuan bahwa setiap tindakan pemerintahan ini harus didasarkan pada asas legalitas, tidak sepenuhnya dapat diterapkan ketika suatu Negara menganut konsepsi *welfare state*, seperti halnya Indonesia. Dalam konsepsi *welfare state*, tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat.²⁹

Secara ilmiah, terdapat perbedaan gerak antara pembuatan seperangkat aturan dengan persoalan-persoalan yang berkembang dimasyarakat. Jika setiap tindakan pemerintah harus selalu berdasarkan regulasi, maka akan banyak persoalan kemasyarakatan yang tidak dapat dilayani secara wajar. Oleh karena itu, didalam konsepsi *welfare state*, tindakan pemerintah tidak selalu harus berdasarkan asas legalitas. Dalam hal-hal tertentu pemerintah dapat melakukan tindakan secara bebas yang didasarkan pada *Freies Ermessen*, yakni kewenangan

²⁸ Inu Kencana Syafi'i, *op.cit.*, hlm. 22

²⁹ Hessel Nogi, *op.cit.*, hlm. 38

yang sah untuk turut campur dalam kegiatan social guna melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan kepentingan umum.

Karakteristiki organisasi birokrasi pemerintahan menurut Philipus M. Hadjon, bahwa birokrasi sebagai organisasi dengan ciri-ciri khusus, menjadi pusat perhatian para ahli berbagai disiplin ilmu social karena jasa Max Weber. Dalam karyanya *The Theory Economy and Social Organization*, Weber mengemukakan konsepnya tentang the ideal *type of burcaucracy* dengan merumuskan cirri-ciri pokok organisasi birokrasi yang lebih sesuai dengan masyarakat modern, yaitu peranan birokrasi secara umum dikemukakan oleh Michael G. Roskin dan kawan-kawan mempunyai fungsi yang meliputi kegiatan-kegiatan pengadministrasian, pelayanan, peraturan, perizinan, pengumpulan informasi dan urusan rumah tangga. Seluruh birokrat pemerintahan menjalankan setidaknya dua ahri fungsi dasar tersebut, dengan sebagian bekerja secara khusus pada biro tertentu dan sebagian lagi menjalankan fungsi ganda.

2.1.4 Konsep Sumber Daya Manusia

Peranan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi bagian dari alam yang sekaligus bagian dari kultur yakni hasil dari perubahan yang menyeluruh disebabkan oleh olah manusia itu sendiri yang disertai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dikumpulkan dari jerih payah dan perjuangan berat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ada beberapa unsur SDM meliputi : kemampuan-kemampuan (*capabilitas*), sikap (*attitude*), nilai-nilai (*values*), kebutuhan-kebutuhan (*needs*) dan karakteristik-karakteristik demografis. Unsur-unsur SDM sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya seperti norma-norma,

nila-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang-peluang yang tersedia. Yang pada akhirnya mempengaruhi peranan dan perilaku individual karena unsur-unsur tersebut saling berinteraksi satu sama lain³⁰.

Sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat didalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya organisasi tersebut.³¹

Menurut Zulkarnain sesungguhnya yang hendak dibangun adalah manusia. Oleh karena itu setiap hal yang telah maupun yang akan dibangun seharusnya nanti dapat memberikan manfaat kepada manusia. Pembangunan manusia mempunyai dua sisi, yaitu³²:

1. Pembentukan kemampuan-kemampuan manusia (*human capabilities*) seperti peningkatan kesehatan, pengetahuan dan keterampilan.
2. Penggunaan dari kemampuan yang telah diperoleh itu untuk bersenang-senang, keperluan produktif, atau untuk aktif dalam urusan budaya, sosial dan politik.

Kemudian ada tiga elemen penting yang menjadi fokus pengukuran pembangunan manusia menurut Zulkarnaen, yaitu³³:

1. Panjang umur (*longevity*), indikatornya adalah tingkat harapan hidup. Hidup yang panjang bernilai berharga, serta sejumlah manfaat tidak langsung lainnya seperti gizi yang memadai, dan kesehatan yang baik adalah berkaitan erat dengan tingkat harapan hidup yang tinggi.

³⁰ Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hal. 35

³¹ *Ibid.*, hlm. 36

³² Zulkarnaen, *Komunikasi Pembangunan*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1996, hlm. 64

³³ *Ibid.*, hlm. 65

2. Pengetahuan (*knowledge*), indikatornya adalah tingkat melek huruf (*literacy rate*).
3. Standar hidup yang pantas (*decentliving standars*), elemen ini yang paling susah diukur. Untuk saat ini indikator yang dipakai adalah pendapatan perkapita yang digabung dengan daya beli (*purchasing power*) yang disesuaikan dengan pendapatan perkapita rill dari pendapatan Bruno Domestik (GDP).

2.1.5 Konsep Peranan

Menurut Koziar Barbara sebagaimana dikutip Lailia Fakhtul Jannah menyebutkan bahwa peranan adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. Peranan dipengaruhi oleh keadaan social baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peranan adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi social tertentu. Peranan adalah deskripsi social tentang siapa kita dan kita siapa. Peranan menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh.³⁴

Menurut Biddle dan Thomas sebagaimana dikutip lailai Fatkhul Jannah, peranan adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnyab dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa member anjuran, member penilaian, member sanksi dan lain-lain. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari

³⁴ Lailia Fatkul Janah, *Teori Peran*, Gunung Mas, Jakarta, 2009, hlm. 82

seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peranan yang tergabung dan terkait pada satu status ini dinamakan perangkat peran. Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat atau yang disebut sebagai struktur social, ditentukan oleh hakekat dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka diantara orang-orang yang memainkannya.

Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan dan memberi imbalan (*reward*) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur social yang berbeda pula. Bila yang diartikan dengan peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu. Maka perilaku peranan adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peranan tersebut. Perilaku peranan mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan.

Teori peranan adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi social yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pameran dalam kategori social (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran social adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, normadan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi social dan faktor lainnya. Teater adalah metafora yang sering digunakan untuk menggambarkan teori peran.

Robert Linton seorang antropolog dikutip Mustafa Hasan, telah mengembangkan Teori Peranan. Teori peranan menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peranan

merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.³⁵ Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menyesuaikan diri dengan peranan yang harus dilakukan itu, adalah³⁶ :

- a. Kejelasan perilaku dan pengetahuan yang sesuai dengan peran
- b. Konsistensi respon orang yang berarti terhadap peran yang dilakukan
- c. Kesesuaian dan keseimbangan antara peran yang diemban
- d. Keselarasan budaya dan harapan individu terhadap perilaku peran
- e. Pemisahan perilaku yang akan menciptakan ketidaksesuaian perilaku peran.

Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang mengobati orang lain, karena dia adalah seorang dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka dia harus mengobati pasien yang datang kepadanya. Perilaku ditentukan oleh peran sosial.

Sosiolog Glen Elder membantu memperluas penggunaan teori peran pendekatannya yang dinamakan “*life course*” memaknakan bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut.³⁷

Pemerintah Desa yang bertugas melayani kepentingan masyarakat memiliki tanggung jawab penuh untuk melaksanakan aktivitas yang dituntut dari

³⁵ Mustafa Hasan, *Perspektif Dalam Psikologi Sosial*, Sarana Ilmu, Yogyakarta, 2000. hlm. 174

³⁶ *Ibid.*, hlm. 176

³⁷ Lailia Fatkul Jannah, *op.cit.*, hlm. 105

pelaksanaan itu. Pembangunan Desa dilakukan dalam rangka pembangunan kewajiban yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat Desa. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan sarana-prasarana, bimbingan dan pengawasan berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa itu sendiri. Pembangunan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran perbaikan kondisi masyarakat Desa sebagian Besar bersifat pembangunan Fisik namun untuk tercapainya pembangunan yang menyeluruh maka pembangunan diarahkan pada segala bidang.³⁸ Peranan pemerintah Desa merupakan suatu proses yang mana usaha-usaha pemerintah untuk mengikat taraf hidup masyarakat, menintegrasikan kehidupan masyarakat ke dalam kehidupan bangsa dan mendorong mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya terhadap kemajuan bangsa dan Negara.

Pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara Bangsa menuju kemajuan dalam rangka pembinaan Bangsa. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pembangunan sebagai berikut :³⁹

- a. Pembangunan merupakan suatu proses yang bermakna rangkaian kegiatan yang berlangsung terus menerus dan bertahap yang bersifat independen dan tanpa akhir. Hal itu dapat ditentukan berdasarkan jangka waktu, biaya dan hasil diperoleh
- b. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai suatu yang akan dilaksanakan.

³⁸ Surya Nigrat, Bayu. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa*. Jakarta, Gramedia.

³⁹ Siagian, Sondang P. 2000. *Pembangunan (konsep Dimensi dan strategi)*. Jakarta, Bumi Aksara

- c. Pembangunan dilakukan secara terencana bermakna, bahwa dalam perencanaan ada pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu dimasa depan.
- d. Rencana pembangunan mengandung makna perubahan dan pertumbuhan. Ini berarti peningkatan kemampuan untuk berkembang dan harus bersikap proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda.
- e. Pembangunan mengarahkan pada modernitas bermakna bahwa cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan system budaya yang kuat tetapi fleksibel.
- f. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan-kegiatan pembangunan yang sifatnya multidimensi yaitu mencakup seluruh segi kehidupan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki berdasarkan prinsip kegotongroyongan dan kekeluarga agar kebutuhan dan keinginan masyarakat tidak terabaikan. Dalam hal ini Pemerintah Desa sangat dibutuhkan perannya untuk mengarahkan partisipasi masyarakat Desa untuk melaksanakan pembangunan.

Peranan baru ada apabila ada kedudukan jadi peranan merupakan aspek yang dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan berarti orang tersebut telah menjalankan perannya. Jadi peranan yang dimaksud adalah tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan.

Peranan adalah keseluruhan hubungan perilaku seseorang dilihat dari fungsinya terhadap organisasi. Disebutkan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai berikut :⁴⁰

- a. Memberikan bimbingan dan bantuan teknis
- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat
- c. Memberikan stimulasi dan motivasi kepada masyarakat
- d. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih berbagai alternative dan mengambil keputusan.
- e. Pelopor dan pemegang prakarsa.

Kemudian Peranan Pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai berikut :⁴¹

- a. Sebagai Stabilisator
- b. Sebagai Inovator
- c. Sebagai Pelopor
- a. Sebagai Stabilisator

Peranan pemerintah sebagai stabilisator mengandung makna Pemerintah Desa harus mampu bekerja dan membuat suasana stabil dan dapat menekan ketidak stabilan yang timbul dimasyarakat desa tentu hal ini memerlukan peranan Pemerintah Desa. Beberapa peran penting yang mestinya dilakukan oleh Pemerintah Desa secara efektif dan efisien sebagai stabilisator yaitu, menjaga dan memelihara kerukunan masyarakat desa antara suku, agama, adat-istiadat, saling menghargai dan menghormati, mengusahakan semaksimal mungkin agar

⁴⁰ Draha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-dimensi pemerintahan Desa*. Jakarta, Bumi Aksara

⁴¹ Siagian, Sondang P. 1996. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta, PT Gunung Agung

konflik tidak terjadi seperti menertibkan dan memelihara keamanan seperti kamtibmas (keamanan dan ketertiban dan masyarakat), Program siskamling yang merupakan upaya menciptakan kondisi yang tertib dan aman sehingga masyarakat dapat menaikan hak dan kewajibannya. Usaha tersebut merupakan suatu upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya suasana yang aman dan tertib agar pembangunan dapat diselenggarakan.

Pemerintah Desa mestinya juga berperan sebagai pengatur pelaksanaan beberapa program-program ekonomi diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari tentunya dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat desa setempat. Berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat harus bersifat multidimensional dan bersama karena dalam kenyataannya mereka yang tidak berdaya secara ekonomi hamper secara otomatis tidak berdaya secara social politik, budaya dan hukum. Oleh karena itu dalam mendorong perkembangan ekonomi daerah kelembagaan social ekonomi menjadi wadah petani. Untuk menaspirasikan motif ekonominya perlu diadakan. Maka Desa mengadakan program usaha ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) sebagai lembaga keuangan mikro milik masyarakat Desa yang dikelola dengan sasaran masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk pembangunan usaha produktif dengan manfaat sumber daya serta potensi dana yang ada. Namun semua ini dapat berjalan apabila didukung oleh kondisi yang kondusif.

Peranan Pemerintah Desa sebagai stabilisator dapat ditunjukkan dengan tidakan seperti berikut ini :

- a. Menjaga dan memelihara kerukunan, keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat Desa (toleransi dan saling hormat menghormati antara suku, agama, adat istiadat dan lain-lain)
- b. Mengembangkan pendapat masyarakat dan Desa (UED-SP)
- c. Menjaga dan memelihara kebersihan dan keasrian Desa (gotong royong)
- d. Meningkatkan kesejahteraan social masyarakat (memenuhi sarana dan prasaranan seperti sarana pendidikan)

b. Inovator

Sebagai Inovator harusnya Pemerintah Desa bisa menjadi sumber ide baru terutama yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan Desa. Inovator dimana peranan pemerintah Desa yang mencakup ide baru, hal-hal baru, serta upaya penerapan ide baru tersebut dalam penerapannya. Artinya inovasi sendiri adalah pembaharuan mengenai hal-hal yang baru, cara efektif baru, dan system baru singkatnya perlu kreatifitas. Dimana innovator itu sendiri artinya adalah kemampuan sebagai agen pembaharuan yang memberikan implikasi. Bahwa pemerintah harusnya dapat menemukan hal-hal yang strategi dan mampu mencermati berbagai perubahan secara cepat, tepat, sekaligus menemukan jawabannya. Karena pemerintah yang handal adalah yang mampu memberikan suatu prakarsa dan mendorong perubahan-prubahan selain itu pemerintah Desa hendaknya mampu membangkitkan antusiasme masyarakat sehingga dapat berperan secara aktif dalam pembangunan.

Peranan pemerintah Desa dalam pembangunan akan dapat berjalan secara aktif dan proaktif apabila didukung oleh sarana dan prasaranan yang baik

dandisertai dengan mekanisme dan prosedur kinerja yang baik dan efektif. Agar peranan terpenuhi dan dapat terwujud dengan efektif pemerintah perlu mendapatkan legitimasi yang luas atau tingkat keabsahan yang tinggi dari masyarakat sehingga memberikan kemudiaan bagi pemerintah Desa untuk diterima dikalangan masyarakat yang nantinya akan mendukung program pemerintah untuk dijalankan. Tindakan innovator bisa berupa tindakan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini :

- a. Merancang dan menerapkan sumber ide dalam pembangunan Desa maksudnya Pemerintah Desa memiliki sumber ide, sumber saran, dan sumber pendapatan mengenai keputusan yang akan diambil sehingga keputusan itu terlaksana.
- b. Menemukan, mensosialisasikan, menerapkan system baru prosedur dan metode kerja dalam pelaksanaan pembangunan Desa dan cepat tanggap terhadap masalah yang muncul serta berusaha mencari solusi untuk pemecahannya.
- c. Pelopor

Sebagai pelopor pemerintah Desa harus menjadi orang yang mampu memberikan contoh bagi seluruh masyarakat Pemerintahan Desa adalah orang yang berdiri digarda terdepan. Ini berarti kepeloporan pemerintah untuk bertindak secara objektif untuk menunjang kelancaran pembangunan Desa. Pemerintah Desa harus mampu mengajak dan memelopori seluruh komponen masyarakat untuk turut serta secara aktif dan proaktif dalam pembangunan Desa, juga tentunya dapat memberikan bukti tentang adanya gebrakan kerja yang jelas ,

cepat dan tepat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa itu benar apa adanya. Tentunya bila peranan tersebut dijalankan secara baik sehingga pada akhirnya masyarakat dengan sendirinya mudah berubah persepsinya dan tindakannya sehingga mempercepat dan memperlancar proses pembangunan.

Peranan Pemerintah Desa sebagai pelopor dapat ditunjukkan melalui tindakan sebagai berikut :

- a. Menunjukkan contoh dalam pelaksanaan disiplin dan pelayanan kerja
- b. Menunjukkan contoh dalam pelaksanaan keputusan Pembangunan Desa
- c. Kepeloporan dalam meningkatkan pengetahuan dan penyuluhan di Desa
- d. Kepeloporan dan Kepedulian terhadap pelestarian dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan

Meskipun pemerintah mempunyai peranan penting dalam pembangunan namun kurang kompak masyarakat dapat menyebabkan semua terkendala. Pembangunan Desa berdasarkan pada kehendak masyarakat itu sendiri, pemerintah hanya sebagai pembeimbing serta pemberi motivasi kepada masyarakat untuk pembangunan desanya. Perkembangan pembangunan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat artinya keberhasilan pembangunan sebagai wujud dari keinginan serta kebutuhan masyarakat yang bermukim di Desa dan melaksanakan tugas kepemimpinannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan, pengalaman, serta pemahaman terhadap masalah masyarakat yang ia pimpin.

Faktor lain yang mempengaruhi berhasil tidaknya proses pembangunan adalah factor partisipasi masyarakat. Dalam program pembangunan sangat

diperlukan sebab keinginan disatu pihak tentu saja akan membuat proses pembangunan terkendala dalam penyelenggaraannya. Dimana biaya dan daya yang dapat disediakan atau dapat dihemat sebagai sumbangan kontribusi masyarakat Desa kepada proyek-proyek pemerintah atau keikutsertaan masyarakat dalam penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan Desa yang dilakukan oleh pemerintah. Partisipasi sebagai sikap untuk ikut serta merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi suatu aktivitas. Usaha untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dapat dikembangkan melalui upaya perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pendekatan pemenuhan kebutuhan masyarakat Desa dan strategi kelompok sasaran pembangunan Desa. Dapat diberi kesimpulan bahwa partisipasi mengandung pengertian keikutsertaan itu baik secara mental, emosi, maupun energy dimana masyarakat mempunyai kemauan untuk berinisiatif dan kreatif dalam melaksanakan kegiatan Desa dengan member dukungan dan bertanggung jawab dengan menyelenggarakan kegiatan pembangunan.

Agar kondisi perbaikan dan upayah memenuhi kebutuhan masyarakat dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka dapat dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya
- b. Dijadikan stimulasi terhadap masyarakat yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban (respon)
- c. Dijadikan motivasi terhadap masyarakat yang berfungsi memperbaiki tingkah laku (behavior) yang dikehendaki secara berkelanjutan.

- d. Dan proyek pembangunan Desa yang dirancang secara sederhana dan muda dikelola oleh masyarakat.

2.1.6 Konsep Pembinaan

Pembinaan menurut Widjaja adalah suatu proses pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha perbaikan, dan akhirnya mengembangkan, dengan demikian pembinaan adalah sejauh mana usaha dari kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, penyusunan program, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dengan semaksimal mungkin.⁴²

Menurut Hidayat mendefinisikan pembinaan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, teratur, dan terarah, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan subjek didik dengan tindakan-tindakan, pengarahan, bimbingan, pengembangan, dan pengawasan dalam pencapaian tujuan pembinaan yang diharapkan meliputi :

1. Memberi pengarahan

Suatu bentuk kinerja organisasi yang terarah dalam pencapaian tujuan melalui bentuk-bentuk pengarahan dengan maksimal sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana.

⁴² Widjaja, Haw. Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa, Jakarta : Raja Grafindo Persada. Tahun 2001. Hal. 139.

2. Memberi bimbingan

Penetapan cara yang telah ditetapkan suatu organisasi dalam mendidik kemampuan berpikir dan pelaksana penerapan hasil pembinaan yang telah diberikan.

3. Melakukan pengawasan

Melakukan pengawasan adalah pelaksanaan monitoring keberlangsungan suatu pelaksanaan yang terjadi dilapangan sesuai dengan penerapan dengan melihat perkembangan dan hasil dari kinerja yang telah dilaksanakan.

4. Memberikan pendidikan dan pelatihan

Memberikan pendidikan dan pelatihan adalah pembekalan materi secara tertulis maupun lisan serta mengikutkan peraktek secara langsung dalam suatu organisasi dengan tujuan yang akan dilaksanakan.

5. Memberi buku petunjuk

Memberi buku petunjuk adalah penetapan pedoman dalam bentuk materi buku yang menerangkan kecakapan dalam bertindak serta menagnalisa bentuk penerapan kegiatan yang berlangsung.⁴³

Menurut Efendi Pembinaan adalah pendidikan dalam rangka perbaikan dan perbaharuan suatu kondisi pada orang perorangan, kelompok maupun dalam aspek bidang kehidupan tertentu secara langsung termasuk di dalamnya bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang politik, sehingga dengan mulai pendidikan itu dapat mencapai titik maksimal.⁴⁴

⁴³Hidayat. *Organisasi Publik*, Jakarta : Ghalia Indonesia. Tahun 2000. Hal 26.

⁴⁴Efendi, Mahrizal. *Pembinaan Ekonomi dan budaya indonesia*. Jakarta ; Balai Pustaka. Tahun 2003. Hal 24.

Menurut ismail (2001:154) mendefenisikan pembinaan sebagai proses komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengetahuan dengan penerima dan pekerja akhir (masyarakat) dan tujuan pembinaan adalah supaya masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih sejahtera dan sempurna.

Menurut Thoha pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atau berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan proses atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan perbaikan atas sesuatu.⁴⁵

1. Pembinaan merupakan pemberian bimbingan, pengarahan, pendidikan dan latihan, instruksi, dan literatur atau buku petunjuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Memberikan pengarahan merupakan suatu proses pemberian petunjuk kinerja perangkat desa melalui kepala
3. Pemberian bimbingan merupakan penyaluran bentuk arahan kenerja yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok individu, agar dapat mandiri melalui berbagai bahan, interaksi, nasihat, dan gagasan yang diselenggarakan dalam suasana asuh yang normative

⁴⁵Miftha Thoha. *Kepemimpinan dalam Manajemen (Suatu Pendekatan Perilaku)*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Tahun 1994. Hal. 71.

4. Melakukan Pengawasan merupakan pengawasan kinerja perangkat desa dalam melayani masyarakat melalui tindakan dan hasil kinerja yang terlaksana
5. Memberikan pendidikan dan pelatihan dalam penelitian ini pendidikan dalam bentuk kinerja yang akan dilaksanakan melalui pelatihan secara menyeluruh terhadap tujuan yang akan dicapai
6. Memberi buku petunjuk adalah sebagai pedoman agar terciptanya kinerja yang terarah berdasarkan tugas masing-masing perangkat desa

Berdasarkan penjelasan diatas Pembinaan merupakan pengarahan bimbingan secara sadar untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian dibidangnya. Didalam pembinaan yang mengarahkan pegawai dapat memahami bidangnya dengan cermat tegas dalam pencapaian suatu tujuan organisasi.

2.1.7 Konsep Ekonomi

Ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat.⁴⁶ Begitu juga Pengertian ekonomi sederhananya bahwa ekonomi adalah sains praktikal mengenai pengeluaran dan penagihan dengan penyelidikan tentang keadaan tentang sebab dan adanya kekayaan suatu negara.⁴⁷

Perekonomian membahas cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas atau langka untuk memperoleh

⁴⁶ Sukirno, Sadono. *Mikroekonomi teori pengantar*/Sadono Sukirno. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Tahun 2006. Hal 62

⁴⁷ Nurul Qamar. *Pengantar Hukum Ekonomi*. diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Refleksi: Makassar. Tahun. 2009. Hal 70

berbagai barang produksi dan mendistribusikannya kepada masyarakat dengan perilaku orang lain dan masyarakat dalam memilih menggunakan sumber daya yang langka dan yang memiliki beberapa alternatif penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.⁴⁸

Ekonomi adalah mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran. Dengan pengetahuan yang mempelajari usaha manusia, usaha dalam hal ini yaitu ke arah kemakmuran atau ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha manusia, usaha dalam hal ini yaitu ke arah kemakmuran.⁴⁹

2.1.8 Konsep Pembangunan

Todaro, menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia⁵⁰. Todaro, mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan⁵¹.

Menurut Todaro, definisi di atas memberikan beberapa implikasi bahwa⁵²:

- a. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan *income*, tetapi juga pemerataan.

⁴⁸ T. Gilarso. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro..Kanisius*. Bandung. Tahun. 2004. Hal, 72

⁴⁹ T. Gilarso. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro..Kanisius*. Bandung. Tahun. 2004. Hal, 72.

⁵⁰ Michael P Todaro, *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta, 2000, hlm. 18

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 20

⁵² *Ibid.*, hlm. 21

b. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti peningkatan:

- 1) *Life sustenance* : Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- 2) *Self-Esteem* : Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, bernilai, dan tidak “diisap” orang lain.
- 3) *Freedom From Survitude* : Kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.

Konsep dasar di atas telah melahirkan beberapa arti pembangunan yang sekarang ini menjadi populer, yaitu⁵³:

- a. *Capacity*, hal ini menyangkut aspek kemampuan meningkatkan income atau produktifitas.
- b. *Equity*, hal ini menyangkut pengurangan kesenjangan antara berbagai lapisan masyarakat dan daerah.
- c. *Empowerment*, hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan sesamanya.
- d. *Suistanable*, hal ini menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian pembangunan.

Menurut Arief pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan, tetapi juga lebih banyak jenis output dari pada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan: masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas, lepas landas,

⁵³*Ibid.*, hlm. 24

gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran⁵⁴. Kunci di antara tahapan ini adalah tahap tinggal landas yang didorong oleh satu sektor atau lebih. Menurut Suryono, tujuan pembangunan ada dua tahap. *Pertama*, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap *kedua* adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya⁵⁵.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang di antaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan. Sanit (dalam Suryono,) menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari pelibatan masyarakat. Ada beberapa keuntungan ketika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, yaitu, *Pertama*, pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa, jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, maka akan tercipta kontrol terhadap pembangunan tersebut. *Kedua*, pembangunan yang berorientasi pada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik. Oleh karena masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan yang sedang terjadi. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu Negara⁵⁶.

⁵⁴ Syaiful Arief, *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan*, Averroes Cipta, Malang, 2006, hlm. 29

⁵⁵ Agus Suryono, *Teori dan Isu Pembangunan*. Universitas Malang Press, Malang, 2001, hlm. 31

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 32

Siagian, mendefinisikan pembangunan adalah: “Suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintahan dalam usaha pembinaan bangsa.” Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam konsep pembangunan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yakni: harus ada usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahnya, dilaksanakan secara sadar, terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai⁵⁷.

Dari beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan tersebut, bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam suasana kehidupan yang penuh harmonis. Dalam pembangunan, peran serta seluruh lapisan masyarakat selaku pelaku pembangunan dan pemerintah selaku pengayom, Pembina dan pengarah sangat diperlukan. Antara masyarakat dan pemerintah harus berjalan seiring, saling mengisi, melengkapi dalam satu kesatuan gerak pembangunan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pembangunan harus menyangkut semua pihak yaitu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, pembangunan yang pertama harus di bina dan dikembangkan adalah pembangunan desa.

Berkenaan dengan pembangunan desa, Juliantara mendefinisikan pembangunan desa sebagai berikut: “Pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat

⁵⁷ Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 21

beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spiritual berdasarkan Pancasila yang berlangsung di desa.⁵⁸

Dengan demikian, maka pembangunan desa perlu terus diupayakan karena secara keseluruhan desa merupakan landasan bagi ketahanan nasional seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, untuk mencapai tujuan dari pembangunan desa itu, pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek kehidupan baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama maupun dalam aspek pertahanan dan keamanan. Melalui pembangunan desa diupayakan agar masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan.

Hakikat dari konsep pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan, dalam mengadakan perubahan-perubahan atau perkembangan menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan pokok pembangunan di mana pembangunan itu harus memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebelum ditelaah tentang pembangunan desa, maka terlebih dahulu dikemukakan arti serta pengertian dasar dari pembangunan pada umumnya, menurut Tjokroamidjojo mengatakan bahwa pembangunan adalah didalam proses atau usaha-usaha perubahan-perubahan sosial tersebut dapat berarti suatu usaha perubahan dan pembangunan dari keadaan dan kondisi masyarakat yang lebih baik⁵⁹. Menurut Katz (dalam Riyadi) mengatakan bahwa

⁵⁸ Dadang Juliantara, *Pembaruan Desa, Bertumpuk Pada Yang Terbawah*, Lappera, Yogyakarta, 2003, hlm. 63

⁵⁹ Bintoro Tjokroamidjojo, *Perencanaan Pembangunan*, Cetakan ke-12, CV. Masagung, Jakarta, 2000, hlm. 42

pembangunan sebagai perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang di pandang lebih bernilai. Pada umumnya tujuan-tujuan pembangunan adalah pembangunan bangsa (*nation building*) atau perkembangan sosial ekonomi⁶⁰. Selanjutnya Menurut pendapat Seers (dalam Suryono), pembangunan adalah hal yang menyangkut proses perbaikan⁶¹. Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pembangunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh suatu masyarakat untuk mencapai suatu kondisi dan situasi yang lebih baik yang meliputi bidang aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Melalui pembangunan nasional, bangsa Indonesia berusaha meningkatkan derajat kemanusiaannya sebagai bangsa yang memiliki kepribadian, sebagai bangsa yang memiliki harga diri, karena pembangunan nasional tidak lain adalah usaha bangsa Indonesia untuk membudayakan dirinya dalam pergaulan dunia yang selalu berubah, sehingga masyarakat Indonesia dapat meningkatkan derajat sebagai masyarakat Indonesia.

Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia merupakan rangkaian upaya bangsa yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional terjadi perombakan, perubahan, dan pembaharuan. Selanjutnya Menurut Sondang, pembangunan mempunyai arti yaitu suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna dan

⁶⁰ Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi menggali potensi dalam mewujudkan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 47

⁶¹ Agus Suryono, *Teori dan Isu Pembangunan*, UM. Pres, Jakarta, 2001, hlm. 15

hasilnya merata serta berkeadilan⁶². Kemudian Menurut Kartasmita, mengatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Dari pendapat-pendapat diatas, jelas bahwa pembangunan merupakan suatu rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu masyarakat dimana masyarakat terlibat baik dalam perencanaannya, pelaksanaan, pemanfaatan hasil maupun evaluasi pembangunan.⁶³ Seiring dengan perkembangan mengenai konsep dan pelaksanaan pembangunan di berbagai Negara, Indonesia juga mengalami perubahan pergeseran paradigma pembangunan, baik dari strategi ekonomi, strategi *people centered*, hingga pada strategi pemberdayaan masyarakat yang dikatakan suatu alternatif baru dalam pembangunan masyarakat.

Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Ginanjar Kartasmita, yaitu ⁶⁴:

⁶² P. Sondang Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta, Bumi Akarsa, 2000, hlm. 3

⁶³ Ginanjar Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan)*, CIDEAS, Jakarta, 1997, hlm.9

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 25

- a. Komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintah dan masyarakat.
- b. Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan essential kegiatan masyarakat.
- c. Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa di wilayah kelurahan.
- d. Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan regional dan daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil.
- e. Menggerakkan partisipasi, prakaras dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu.

Jadi di dalam merealisasikan pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek, jangan dari satu aspek saja, agar pembangunan desa itu dapat sesuai dengan apa yang diinginkan. Pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan artinya harus melibatkan semua komponen yaitu dari pihak masyarakat dan pemerintah, dan harus langsung secara terus menerus demi tercapainya kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk memberikan gambaran alur fikir penelitian, maka dapat penulis tampilkan alur kerangka berfikir penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Tentang Analisis Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya)



Sumber :Modifikasi Penulis, 2019

2.3 Konsep Operasional

Untuk Menghilangkan serta menghindari dari kesalah pahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut :

1. Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar adalah suatu daya atau upaya atau kemampuan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar yang menduduki jabatan dalam mengarahkan dan membimbing dalam mencapai tujuan yakni tumbuh dan berkembang mencapai kesejahteraan perekonomian masyarakat Desa.
2. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah adalah Bidang yang melakukan pembinaan pengembangan terhadap Setiap Usaha Kecil dan Menengah.
3. Seksi Pembinaan IKM Aneka Industri adalah seksi yang secara khusus melakukan pembinaan Aneka Industri.
4. Pembinaan adalah pemberian pelatihan didalam pencapaian kemampuan yang lebih maksimal didalam tujuan yang akan dicapai.
3. Memberi pengarahan adalah Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar berperan penting dalam mengarahkan kepemilikan usaha kerajinan industr dalam meningkatkan pengetahuan dan pertumbuhan perekonomian masuarakat desa.
4. Memberi bimbingan adalah Seksi Pembinaan IKM Aneka Industri mampu berdiskusi terhadap masyarakat desa bentuk-bentuk program yang diberikan

yang bertujuan agar masyarakat paham dan mengerti dalam pengembangan usaha kerajinan industri yang diberikan.

5. Melakukan pengawasan adalah Seksi Pembinaan IKM Aneka Industri mengawasi kegiatan pelaksanaan usaha kerajinan industri oleh kepemilikan usaha secara langsung guna agar tidak terjadinya kesalahan dan kendala dalam mengembangkan usaha industri tersebut.
6. Memberikan pendidikan dan pelatihan adalah Seksi Pembinaan IKM Aneka Industri memberikan pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan usaha kerajinan industri agar kepemilikan usaha kerajinan industri paham serta mengetahui bagaimana pengembangan usaha hasil kerajinan industri tersebut.
7. Memberi buku petunjuk adalah Seksi Pembinaan IKM Aneka Industri memberikan buku petunjuk dalam pengembangan hasil kerajinan industri yang diberikan agar masyarakat lebih paham bagaimana penanganannya lebih cepat dan maksimal serta dapat bersaing ditingkat pasar ekonomi masyarakat.

2.4 Operasional Variabel

Tabel 2.1 Operasional Variabel penelitian Tentang Analisis Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya)

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Sub Indikator 4	Kategori 5
Pembinaan adalah usaha yang dilakukan secara sadar, teratur, dan terarah, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan subjek didik dengan tindakan-tindakan, pengarahan, bimbingan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. (Hidayat, 2000: 26).	Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Kerajinan Industri)	Memberi pengarahan	1. Pengarahan pegentahuan pengelolaan Pandai Besi. 2. Pencapaiannhasil pengelolaan Pandai Besi 3. Bentuk Pemasaran Pandai Besi.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		Memberi bimbingan	1. Bimbingan secara tertulis. 2. Bimbingan secara Praktek.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		Melakukan pengawasan	1. Pengawasan Keberlamngungan kegiatan pengelolaan Pandai Besi. 2. Pengawasan hasil kegiatan pengelolaan Pandai Besi.	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		Memberikan pendidikan dan pelatihan	1. Kegiatan Pelatihan secara tertulis. 2. Kegiatan Pelatihandalam bentuk peraktek	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		Memberi buku petunjuk	1. Pengembangan usaha Pandai Besi 2. Penaganan hambatan usaha Pandai Besi. 3. Pengembangan Pemasaran usaha.Pandai	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

2.5 Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui pelaksanaan Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar di berikan ukuran variable sebagai berikut :

- Baik** : Apabila seluruh Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya) 66%-100%
- Cukup Baik** : Apabila sebagian dari Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya) 33%-65%
- Kurang Baik** : Apabila tidak satupun Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya) 0%-32%

Katagori pengukuran untuk setiap indikator variable penelitian ini di uraikan sebagai berikut :

1. Memberi pengarahan, dapat dikatakan gorikan:

- Baik** : Apabila 2 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 66%-100%
- Cukup Baik** : Apabila 1 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 33%-56%

Kurang Baik : Apabila tidak sama sekali item penilaian yang dapat dilaksanakan dengan persentase 0%-32%

2. Memberi bimbingan, dapat dikatakan gorikan:

Baik : Apabila 2 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 66%-100%

Cukup Baik : Apabila 1 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 33%-56%

Kurang Baik : Apabila tidak sama sekali item penilaian yang dapat dilaksanakan dengan persentase 0%-32%

3. Melakukan pengawasan, dapat dikatakan gorikan:

Baik : Apabila 2 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 66%-100%

Cukup Baik : Apabila 1 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 33%-56%

Kurang Baik : Apabila tidak sama sekali item penilaian yang dapat dilaksanakan dengan persentase 0%-32%

4. Memberikan pendidikan dan pelatihan, dapat dikatakan gorikan:

Baik : Apabila 2 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 66%-100%

Cukup Baik : Apabila 1 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 33%-56%

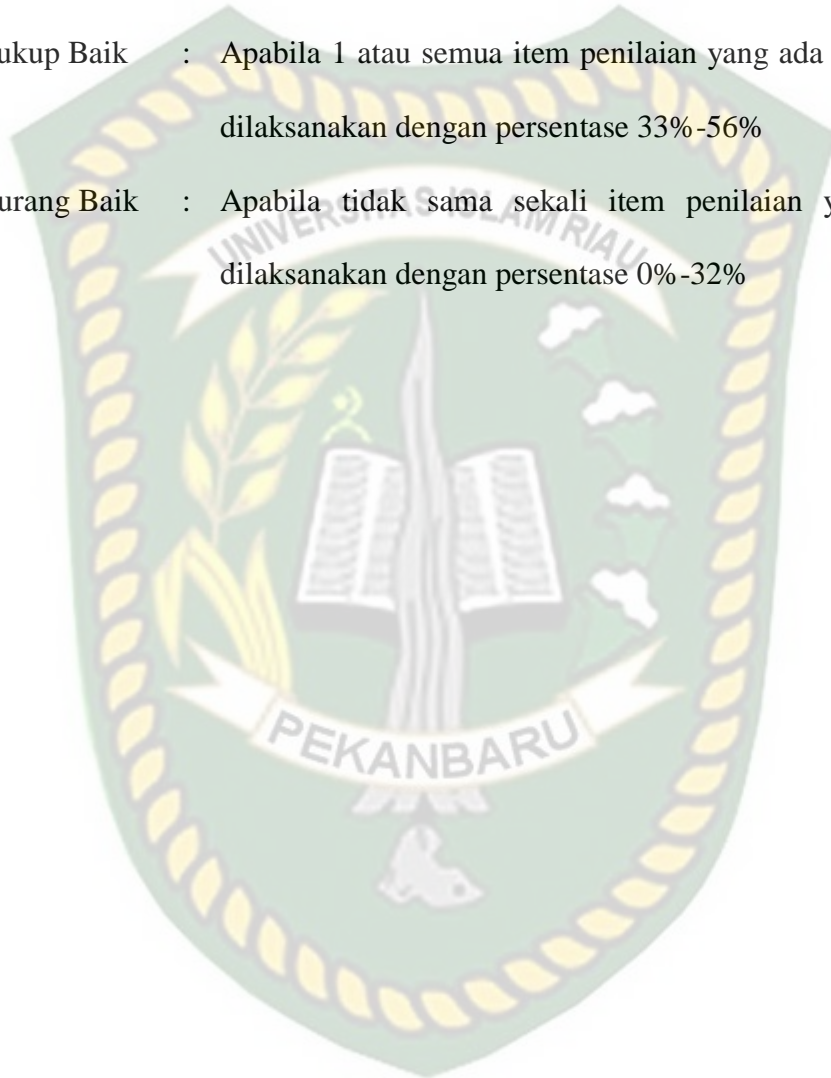
Kurang Baik : Apabila tidak sama sekali item penilaian yang dapat dilaksanakan dengan persentase 0%-32%

5. Memberi buku petunjuk, dapat dikatakan gorikan:

Baik : Apabila 2 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 66%-100%

Cukup Baik : Apabila 1 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 33%-56%

Kurang Baik : Apabila tidak sama sekali item penilaian yang dapat dilaksanakan dengan persentase 0%-32%



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode kuantitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran.

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluru populasi. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap populasi dengan menggunakan kusioner sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan kusioner yang dimaksud diatas untuk disebarkan kepada populasi yang sudah ditentukan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian penulis lakukan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dalam Kerajinan Industri di Kecamatan Rumbio Jaya, dengan alasan berdasarkan pengamatan yang ditemukan dilapangan bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dalam Kerajinan

Industri berdasarkan tugas kewenangannya dinilai belum terlaksana dengan baik dimana dalam pengembangan Usaha Kerajinan Industri Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya belum menciptakan hasil yang maksimal dimana masih banyak usaha kerajinan industri belum menerima pembinaan dan pelatihan dikarenakan kurangnya sosialisasi serta belum adanya Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar turun langsung dalam menetapkan program yang akan diberikan terhadap masyarakat desa serta kurangnya kerjasama dengan kepala desa dalam menentukan usaha kerajinan industri yang berhak menerima pembinaan dan pelatihan.

3.3 Populasi dan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi juga harus representative (mewakili). Karena jika tidak representative.⁶⁵

Adalah jumlah keseluruhan suatu objek yang akan di teliti dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 : Populasi Dan Sampel Penelitian di Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.

NO	Subjek Penelitian	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Seksi Pembinaan IKM Aneka Industri	1	1	100%
2	Kepemilikan Usaha Kerajinan Pandai Besi	30	30	100%
	Jumlah	31	31	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

⁶⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta. Tahun 2012. Hal. 81.

3.4 Teknik Penarikan Sampel

Menurut Sugiono (2011;80) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dengan keseluruhan subjek penelitian.⁶⁶

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan populasi dan sampel, pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar digunakan penarikan sensus karena jumlah populasi tidak terlalu besar. Sehingga dapat diketahui jumlah sampel penelitian berjumlah 1 yang terdiri dari Kepala Seksi Pembinaan IKM Aneka Industri.

Kemudian Kepemilikan Usaha Kerajinan Pandai Besi digunakan penarikan sensus karena jumlah populasi tidak terlalu besar sehingga populasi secara menyeluruh dijadikan sampel yang berjumlah berjumlah 30 sampel dari 30 Populasi.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu :

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari data narasumber yang merupakan sumber informasi untuk memperoleh jawaban mengenai permasalahan dalam penelitian yakni tentang Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten

⁶⁶Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta. Hal, 62

Kampar dalam melaksanakan pembinaan usaha kerajinan industri dan wawancara berupa komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur Organisasi.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data skunder berupa Undang-Undang, buku-buku, jurnal, laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan data yang jelas dan lengkap dalam suatu penelitian maka penelitian di tuntut kemampuannya untuk memilih teknik yang tepat. Atas dasar itu maka untuk memperoleh data yang lengkap dan objektif penyusunan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian.⁶⁷

2. Wawancara,

⁶⁷ Moelong, J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT, Remaja Rosda Karya, Bandung, Hal. 174

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2005:186).Dimana dengan melakukan Tanya jawab langsung terhadap kepada populasi yang sudah terpilih menjadi responden dengan peneliti dua cara yaitu terstruktur atau bebas dengan alasan untuk memperoleh data yang akurat yaitu wawancara terhadap kepala Seksi Pembinaan IKM Aneka IndustriDinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.

3. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dengan maksud untuk memperoleh tanggapan mengenai bagaimana pelaksanaan pembinaan oleh Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Fungsi usaha kerajinan industri. Dalam penyebaran kuisisioner dalam penelitian ini yaitu dengan mengajukan daftar pertanyaan tertulis yang dilengkapi alternative jawaban kepada responden yang telah ditetapkan sebagai responden penelitian yaitu Kepemilikan Usaha Kerajinan Industri Pandai Besi.

4. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu bukti-bukti data yang berkaitan terhadap

pelaksanaan pembinaan oleh Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar yang meliputi Perundang-undangan, peraturan Daerah Kabupaten Kampar, Jumlah pemilik Usaha Kerajinan Industri Pandai Besi.

3.7 Teknik Analisa Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut masing-masing variable beserta indikatornya. Kemudian data di analisis secara kualitatif dan kuantitatif beserta kualitas yang dilengkapi dengan data persentase (%) berikut penjelasan serta deskriptif yang nantinya digambarkan dalam bentuk table dan uraian.⁶⁸

3.8 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Julisampai dengan bulan Desember2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 : Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke Tahun 2019																							
		Juli				Agustus				Septemb er				Oktobe r				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusun an UP	■	■	■	■																				
2	Seminar UP					■																			
3	Revisi UP						■																		
4	Revisi Quisione r							■	■																

⁶⁸Moleong, Lexy, 2004. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan*. Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 348

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor:10/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01°00'40" Lintang Utara sampai 00°28'30" Lintang Selatan dan 100°28'30" - 101°14'30" Bujur Timur dengan Jumlah penduduk Kabupaten Kampar adalah 773.171 orang yang terdiri dari penduduk laki-laki 397.107 jiwa (51,36 persen) dan wanita 376.064 jiwa (48,64 persen). Daerah ini terdiri dari 20 kecamatan dan 250 desa/kelurahan. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat, dan
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak

Peraturan Bupati Kampar Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dimana pasal 3 bahwa Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerjaterdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuagandan Aset.
3. Bidang Pengembangan Potensi Industri terdiri dari:
 - c. Seksi Pendataan Potensi dan Pelaporan Industri;
 - d. Seksi Perizinan dan Pengawasan Industri.
5. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan IKM Aneka Industri;
 - b. Seksi Pembinaan IKM Sandang dan Pangan.
4. Bidang Pengembangan dan ProduktivitasTenaga Kerja terdiri dari :
 - c. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
 - d. Seksi Informasi, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
7. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaanterdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial;
 - b. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial;
 - c. Seksi Pengawasan Perlindungan dan Perizinan Tenaga Kerja.

Dari uraian tugas Dinas Perindustrian dan Menengah Kabupaten Kampar salah satunya adalah Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan tugas pokok sebagaimana diatur pada Pasal 14meliputi :

- a. Menghimpun dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di seksi Pembinaan dan Pengembangan IKM Aneka Industri dan Kerajinan;
- c. Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan, standarisasi industri dan teknologi industri, peningkatan daya saing, penumbuhan wirausaha, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan industri menengah agro,

- kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, serta elektronika dan telematika;
- d. Memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap pelaku usaha industri dan kerajinan untuk meningkatkan dan pengembangan industri;
 - e. Menyusun rencana dan bahan pembinaan Aneka industri dan kerajinan;
 - f. Menyusun strategi perencanaan pemasaran dan promosi produk Aneka Industri dan Kerajinan;
 - g. Mempersiapkan dan merencanakan industri agar bisa mengakses bantuan modal baik melalui PEMDA, BANK, BUMN, BUMD maupun Perusahaan swasta;
 - h. Menginventarisasi potensi dan permasalahan yang ada seksi Aneka Industri dan Kerajinan sebagai dasar untuk pengembangan IKM;
 - i. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang pembinaan dan pengembangan Industri kecil menengah.

4.1 Identitas Responden

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyerahan kuisioner dan wawancara.

1. Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penyebaran Kuissioner, wawancara dan kuisisioner yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas responden. Dan yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingka analisis yang akan diberikan dalam menilai.

Analisis Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya). Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden

yang terdiri dari jenis kelamin, umur dan pendidikan, yang dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel 4.1 Klasifikasi Responden Analisis Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya) Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Laki-Laki	21	70%
2	Perempuan	9	30%
Jumlah		31	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara laki-laki dengan jumlah 21 responden atau sekitar 70%, hal ini disebabkan laki-laki adalah responden yang paling banyak berperan dalam mengikuti pembinaan. Selanjutnya responden jenis kelamin perempuan sebanyak 9responden hal ini diketahui perempuan adalah jumlah yang sedikit dalam mengikuti pembinaan. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian selajutnya berdasarkan umur yang mana dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel 4.2 Klasifikasi Responden Analisis Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya)Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	26-39 tahun	10	32%
2	40-49 tahun	20	65%
3	≥ 50 tahun	1	7%
Jumlah		31	3%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara usia 40-49 tahun dengan jumlah 20 orang yang terdiri masyarakat penerima pembinaan. usia 40-49 tahun merupakan usia yang produktif dan aktif dalam melakukan sebuah pekerjaan atau kegiatan. Kemudian usia responden umur 25-39

sebanyak 10 yang terdiri dari masyarakat penerima pembinaan, berusia 50 keatas berjumlah 1 terdiri dari pegawai Dinas dari keseluruhan responden. Kemudian penggolongan responden penelitian berdasarkan pendidikan yang merupakan factor penilaian pengetahuan responden, yang mana dapat terlihat pada tabel dibawa ini :

Tabel 4.3 Klasifikasi Responden Penelitian Analisis Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
1	SMP	9	29%
2	SMA	19	61%
3	Diploma	2	6%
4	Sarjana	1	3%
Jumlah		31	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Dari data diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden terbesar adalah SMA sebanyak 20 orang, SMP sebanyak 9 orang, Diploma sebanyak 2 orang, Sarjana 1 orang dari keseluruhan jumlah responden.

4.2 Hasil Penelitian

1. Analisis Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya)

Dalam Pelaksanaan Analisis Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya) dengan melaksanakan pembinaan

terhadap pengusaha kerajinan industri Pandai Besi dalam bentuk pemberian pelatihan pengembangan Usaha Pandai Besi.

Pelaksanaan Usaha/Perusahaan Industri Kecil dan Menengah Non formal di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dengan Jumlah Usaha sebanyak 183. Hal ini terlihat bahwa usaha yang paling banyak adalah Usaha Industri Kerajinan Pandai Besi sebanyak 91 usaha sehingga Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar megnupayakan memberikan pembinaan dan pelatihan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan hasil kerajinan.

Pembinaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar tidak terlepas dari program kegiatan yang secara langsung dilaksanakan dengan tujuan tercapainya kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dalam pencapaian pembinaan pelatihan bagi setiap Industri padai Besi. Adapun program kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar terhadap Industri padai Besi dalam kurun tahun 2016 sampai dengan 2019 sebagai berikut:

1. Melakukan Pendataan setiap Industri Usaha Pandai Besi;
2. Penetapan Pembinaan dan Pelatihan bagi setiap Industri Usaha Pandai Besi;
3. Waktu Pembinaan dan Pelatihan selama 5 (lima) Hari;
4. Pemasaran dan Promosi Produk Industri Usaha Pandai Besi;

Bentuk Pembinaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar terhadap usaha Pandai Besi meliputi:

1. Cara pembuatan;
2. Kualitas;
3. Keterampilan dan;
4. Pemasaran.

Berkenaan dengan upaya pembinaan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Kampar perlu dilakukan pembinaan sesuai bidang usaha yang dijalankan selama ini. Disamping itu perlunya pengembangan kemampuan sumber daya manusia, karena melalui pembinaan tersebut diharapkan berkembangnya usaha industri kecil dan menengah di Kabupaten Kampar. Dalam upaya pembinaan industri kecil dan menengah memang diperlukan suatu langkah yang tepat sehingga permasalahan yang mengemuka dapat teratasi, dan harapan para pengusaha industri kecil dan menengah untuk sejahtera dapat terealisasi.

Permasalahan mendasar untuk sektor industri kecil dan menengah di Kabupaten Kampar adalah seringnya terhambat dengan keterbatasan modal, SDM yang masih kurang mampu, kesulitan untuk mendapatkan bahan baku, dan sulitnya pemasaran khususnya produk kerajinan. Oleh karena itu perlu adanya terobosan-terobosan yang diperlukan dalam pengembangannya.

Namun yang menjadi permasalahan dalam Pelaksanaan pembinaan terhadap usaha Pandai Besi bahwa diketahui kurangnya potensi Dinas dalam melakukan pelatihan pengetahuan akan pengelolaan Pandai Besi, pembinaan yang ditetapkan mulai dari jumlah hari kegiatan dan jumlah waktu kegiatan pembinaan. Melihat keadaan tersebut perlu adanya peningkatan pembinaan yang diberikan guna pencapaian pembaharuan pengusahaan Pandai Besi agar

prngusahan Pandai Besi dapat mengembangkan kemampuan serta hasil kegtan yang lebih baik lagi.

4.3 Analisis Data

Untuk mengetahui pelaksanaan Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya), yaitu :

4.1.1 Memberi Pengarahan

Memberi pengarahan adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar berperan penting dalam mengarahkan kepemilikan usaha kerajinan industr dalam meningkatkan pengetahuan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat desa. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Analisis Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya). Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Memberi pengarahan yaitu :

1. Pengarahan pegentahuan pengelolaan Pandai Besi.
2. Pencapaiann hasil pengelolaan Pandai Besi
3. Bentuk Pemasaran Pandai Besi.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Analisis Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Ppada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya) dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel 4.4 Jawaban Responden Mengenai Indikator Memberi pengarahan Dalam Analisis Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya)

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pengarahan pegentahuan pengelolaan Pandai Besi.	10 (33%)	16 (53%)	4 (13%)	30
2	Pencapaiannhasil pengelolaan Pandai Besi.	9 (30%)	17 (57%)	4 (13%)	30
3	Bentuk Pemasaran Pandai Besi.	8 (27%)	19 (63%)	3 (10%)	30
Jumlah		27	52	11	90
Rata-rata		9	17	4	30
Persentase		30%	57%	13%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Memberi pengarahan dalam item penilaian Pengarahan pegentahuan pengelolaan Pandai Besi yang mana responden penelitian pada Analisis Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya) yang menjawab baik sebanyak 10 responden atau 33% dengan alasan, Pengarahan pegentahuan pengelolaan Pandai Besi dengan memberikan penegenalan bahan-bahan pengelolaan besi. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 16 responden atau 53% dengan alasan, Pengarahan pegentahuan pengelolaan Pandai Besi dengan pengenalan akan pengelolaan besi agar dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 4 responden atau 13% dengan alasan, Pengarahan pegentahuan pengelolaan Pandai

Besi belum terlaksana dengan baik dengan memberikan akan pengetahuan masyarakat akan pengelolaan Pandai Besi dengan cepat dan tepat.

Kemudian untuk item penilaian Pencapaiannhasil pengelolaan Pandai Besiyang mana responden penelitian pada Analisis Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya)yang menyatakan baik berjumlah 9 responden atau 30% dengan alasan, Pencapaiannhasil pengelolaan Pandai Besi sudah dilakukan dengan tujuan agar kegiatan pengelolaan Pandai Besi dapat diolah dengan baik.Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 17 responden atau 57% dengan alasan, Pencapaiannhasil pengelolaan Pandai Besi sudah dilakukan melalui pengarahan akan tetapi pengarahan yang diberikan belum secara detail sehingga pemilik usaha Pandai Besi belum memahamai secara luas pengarahan yang diberikan.Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 4 responden atau 13% dengan alasan, Pencapaiannhasil pengelolaan Pandai Besi belum terlaksana dengan baik melalui pemberian pengarahan sehingga masyarakat pengusaha Pandai Besi belum memiliki pengetahuan secara luas didalam pengembangan isaha Pandai Besi.

Kemudian untuk item Penilaian Pemasaran PandaiBentuk Pemasaran Pandai Besi Besi yang mana responden penelitian Analisis Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya)yang menyatakan baik sebanyak 8 responden atau 27% dengan alasan, pengarahan didalam Pemasaran Pandai Besi sudah dilakukan terhadap pengusaha Pandai Besi.

Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 19 responden atau 63% dengan alasan, pengarahan Pemasaran Pandai Besi sudah dilakukan akan tetapi bentuk pemasaran yang diberikan Disperindag masih di sekitar Dalam Kota. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 3 responden atau 10% dengan alasan, pemasaran Pandai Besi belum memberikan pencapaian pengusaha andai besi untuk berkembang melainkan hanya skala local saja.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Memberi pengarahan di dalam Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya) dalam katagori cukup baik, kata gori cukup baik dengan nilai responden 17 atau 57% dengan alasan, pengarahan didalam meningkatkan pengetahuan pemelik usaha Pandai Besi belum memberikan dampak keberhasilan pegetahuan pengusaha Pandai Besi didalam pengelolaan Besi dikarenakan hanya sebatas pengarahan saja tanpa pengarahan didalam meningkatkan kemampuan pegelolaan Pandai Besi, serta pemasaran Prodak Besi belum memberikan pengarahan didaam pemasaran sampai kelur daerah pelainkan hanya didalam daerah saja. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Memberi pengarahan dalam Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya) melalui Pengarahan pegentahuan pengelolaan Pandai Besi, Pencapaiann hasil pengelolaan Pandai Besi, Pemasaran Pandai Besi.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Kepala Seksi Pembinaan IKM Aneka Industri Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Bapak Topan Ramsilas dalam Pembinaan Pengrajin Pandai Besi pada tanggal 05 Agustus 2019.

“...Sejauh ini kami sudah melakukan pengarahan terhadap pemilik usaha pengrajin Pandai Besi dengan pengarahan kemampuan didalam pengelolaan Pandai Besi, dan bentuk-bentuk pemasaran Pandai Besi hal ini bertujuan agar pengrajin Pandai Besi dapat mengembangkan dan memasarkan usahanya tersebut, meskipun sejauh ini pengarahan yang kami berikan belum secara luas akan tetapi pengarahan yang kami berikan mengarah kemampuan pengetahuan pengrajin Pandai Besi....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pembinaan Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya oleh Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar belum terlaksana dengan baik melalui pemberian pengarahan sehingga belum memberikan dampak keberhasilan pengetahuan pengusaha Pandai Besi didalam pengelolaan Besi.

Berdasarkan hasil Kuesioner, wawancara dan Observasi penulis menganalisa bahwa diketahui bahwa Pembinaan Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya oleh Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar belum terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat melalui pemberian pengarahan didalam meningkatkan pengetahuan pemilik usaha Pandai Besi belum memberikan dampak keberhasilan pengetahuan pengusaha Pandai Besi didalam pengelolaan Besi dikarenakan hanya sebatas pengarahan saja tanpa pengarahan didalam meningkatkan kemampuan pengelolaan Pandai Besi, serta pemasaran Produk Besi belum memberikan pengarahan didalam pemasaran sampai keluar daerah melainkan hanya didalam daerah saja. Sehingga dapat dikatakan

Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya) dalam kata gori cukup baik

4.1.2 Memberi bimbingan

Memberi bimbingan adalah Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar mampu berdiskusi terhadap masyarakat desa bentuk-bentuk program yang diberikan yang bertujuan agar masyarakat paham dan mengerti dalam pengembangan usaha kerajinan industri yang diberikan. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Analisis Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya). Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Memberi pengarahan yaitu :

1. Bimbingan secara tertulis.
2. Kegiatan Pelatihan dalam bentuk peraktek.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Analisis Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya) dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel 4.5 Jawaban Responden Mengenai Indikator Memberi bimbingan Dalam Analisis Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya)

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Bimbingan secara tertulis.	12 (40%)	15 (50%)	3 (10%)	30
2	Kegiatan Pelatihan dalam bentuk peraktek .	7 (23%)	17 (57%)	6 (20%)	30
Jumlah		19	32	9	60
Rata-rata		10	16	4	30
Persentase		33%	53%	14%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Memberi bimbingan dalam item penilaian Bimbingan secara tertulis yang mana responden penelitian pada Analisis Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya) yang menjawab baik sebanyak 12 responden atau 40% dengan alasan, Bimbingan secara tertulis sudah dilakukan didalam pengemabagan usaha Pandai Besi. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 15 responden atau 50% dengan alasan, Bimbingan secara tertulisdidlam pengembangan usaha Pandai Besi melalui pemberian materi tata cara pengembangan usaha Pandai Besi akan tetapi bimbingan yang diberikan masih kurangnya waktu yang diberikan dikarenakan masyarakat pengrajin Pandai Besi rata-rata memmiliki tingkat kemampuan pendidikan SMA sehingga perlunya kegiatan bimbingan yang memakan waktu lama sampai dengan 1 minggu. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 3 responden

atau 10% dengan alasan, Bimbingan secara tertulis belum terlaksana dengan baik dikarenakan singkatnya waktu bimbingan secara tertulis sehingga belum memberikan dampak terhadap pengetahuan pengrajin Pandai Besi.

Kemudian untuk item penilaian Kegiatan Pelatihan dalam bentuk peraktek yang mana responden penelitian pada Analisis Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya) yang menyatakan baik berjumlah 7 responden atau 23% dengan alasan, Bimbingan Kegiatan Pelatihan dalam bentuk peraktek sudah dilakukan secara langsung didalam pengembangan pengelolaan Pandai Besi. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 17 responden atau 57% dengan alasan, Bimbingan Kegiatan Pelatihan dalam bentuk peraktek sudah dilakukan akan tetapi bimbingan yang diberikan belum memberikan dampak pengetahuan bagi pengrajin Pandai Besi dikarenakan waktu yang singkat 5 hari seharusnya minimal 1 minggu.. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 6 responden atau 20% dengan alasan, Bimbingan Kegiatan Pelatihan dalam bentuk peraktek belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan singkatnya waktu bimbingan secara lisan sehingga belum memberikan dampak pengetahuan terhadap pengrajin Pandai Besi.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Memberi bimbingan di dalam Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya) dalam katagori cukup baik, kata gori cukup baik dengan nilai responden 16 atau 53% dengan

alasan, bimbingan yang diberikan terhadap pengrajin Pandai Besi melalui bimbingan secara tertulis dan bimbingan secara lisan belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya waktu kegiatan pembinaan sehingga belum memberikan dampak pengetahuan pengrajin Pandai Besi yang seharusnya dapat dilakukan selama 1 minggu melainkan hanya 5 hari. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Memberi bimbingan dalam Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya) melalui Bimbingan secara tertulis, Bimbingan secara lisan.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Kepala Seksi Pembinaan IKM Aneka Industri Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Bapak Topan Ramsilas dalam Pembinaan Pengrajin Pandai Besi pada tanggal 05 Agustus 2019.

“...Sejauh ini bimbingan yang kami berikan secara lisan dan tertulis sudah terlaksana meskipun bimbingan yang kami berikan belum memberikan dampak bagi masyarakat pengrajin Pandai Besi dikarenakan singkatnya waktu hal ini sesuai dengan program pembinaan yang telah ditetapkan akan tetapi kami selaku Disperindag mengupayakan pencapaian bimbingan terhadap masyarakat pengrajin Pandai Besi dengan baik agar mereka mampu didalam pengelolaaan kegiatan Pandai Besi.....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pembinaan Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya oleh Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar melalui bimbingan secara tertulis dan bimbingan secara lisan belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya waktu kegiatan pembinaan dimana waktu kegiatan dilakukan hanya selama 5 hari yang seharusnya dapat dilaksanakan selama 6 hari.

Berdasarkan hasil Kuesioner, wawancara dan Observasi penulis menganalisa bahwa diketahui bahwa Pembinaan Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya oleh Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar yang diberikan terhadap pengrajin Pandai Besi melalui bimbingan secara tertulis dan bimbingan secara lisan belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya waktu kegiatan pembinaan sehingga belum memberikan dampak pengetahuan pengrajin Pandai Besi yang seharusnya dapat dilakukan selama 6 Hari melainkan hanya 5 hari. Sehingga dapat dikatakan Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya) dalam kata gori cukup baik.

4.1.3 Melakukan pengawasan

Melakukan pengawasan adalah Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar mengawasi kegiatan pelaksanaan usaha kerajinan industry oleh kepemilikan usaha secara langsung guna agar tidak terjadinya kesalahan dan kendala dalam mengembangkan usaha industry tersebut. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Analisis Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya). Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Memberi pengarahan yaitu :

1. Pengawasan Keberlamngsungan kegiatan pengelolaan Pandai Besi.
2. Pengawasan hasil kegiatan pengelolaan Pandai Besi.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Analisis Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya) dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel 4.6 Jawaban Responden Mengenai Indikator Memberi pengawasan Dalam Analisis Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya)

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pengawasan Keberlangsungan kegiatan pengelolaan Pandai Besi.	11 (36%)	14 (47%)	5 (17%)	30
2	Pengawasan hasil kegiatan pengelolaan Pandai Besi.	9 (30%)	11 (36%)	10 (33%)	30
Jumlah		20	25	15	60
Rata-rata		10	12	8	30
Persentase		33%	40%	27%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Memberi pengawasandalam item penilaian Pengawasan Keberlangsungan kegiatan pengelolaan Pandai Besiyang mana responden penelitian pada Analisis Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya)yang menjawab baik sebanyak 11 responden atau 36% dengan alasan, pengawasan Keberlangsungan kegiatan pengelolaan Pandai Besi sudah dilakukan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 14 responden

atau 47% dengan alasan, pengawasan Keberlangsungan kegiatan pengelolaan Pandai Besi sudah dilakukan akan tetapi pengasan yang dilakukan Disperindag belum secara rutin memberikan masukan akan adanya masalah didalam pengelolaan Pandai Besi. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 5 responden atau 17% dengan alasan, pengawasan Keberlangsungan kegiatan pengelolaan Pandai Besi belum terlaksana dengan baik dikarenakan pengawasan yang dilakukan belum memberikan upaya melalukan perbaikan pengelolaan Pandai Besi oleh pengrajin melainkan berlangsung begitu saja dikarenakan kurangnya jumlah pegawai didalam melakukan pengawasan.

Kemudian untuk item Pengawasan hasil kegiatan pengelolaan Pandai Besiyang mana responden penelitian pada Analisis Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya) yang menyatakan baik berjumlah 9 responden atau 30% dengan alasan, Pengawasan hasil kegiatan pengelolaan Pandai Besisudah dilakukan guna mengenali akan hasil kegiatan pengelolaan Pandai Besi.Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 11 responden atau 36% dengan alasan, Pengawasan hasil kegiatan pengelolaan Pandai Besisudah dilakukan akan tetapi belum adanya evaluasi terkait hasil kegiatan agar lebih meningkatkan pegenlolaan Pandai Besi.. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 10 responden atau 33% dengan alasan, Pengawasan hasil kegiatan pengelolaan Pandai Besibelum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya jumlah pegawai serta belum memberikan peningkatan pengelolaan Pandai Besi bagi pengrajin.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Memberi pengawasan di dalam Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya) dalam katagori cukup baik, kata gori cukup baik dengan nilai responden 12 atau 40% dengan alasan,kegiatan pembinaan pengrajian Pandai Besi melalui pengawasan yang dilakukan Disperindag belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya jumlah pegawai didalam melakukan pengawasan sehingga kegiatan pengawasan berlangsung begitu saja tanpa ada evaluasi terkait adanya kendala dan permasalahan didalam pengelolaan Pandai Besi oleh masyarakat.Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Memberi bimbingan dalam Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya) melalui Pengawasan Keberlangsungan kegiatan pengelolaan Pandai Besi, Pengawasan hasil kegiatan pengelolaan Pandai BesiBimbingan secara tertulis, Bimbingan secara lisan.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Kepala Seksi Pembinaan IKM Aneka Industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Bapak Topan Ramsilas dalam Pembinaan Pengrajin Pandai Besi pada tanggal 05 Agustus 2019.

“...Sejauh ini pengawasan yang kami berikan didalam hasil kegiatan pengelolaan Pandai Besi sudah terlaksana meskipun masih terbilang adanya kendala dikarenakan kurangnya jumlah pengawai didalam pengawasannya akan tetapi kami selalu berusaha didalam pencapaian hasil kegiatan pengrajian Pandai Besi...”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pembinaan Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar terlihat pengawasan yang dilakukan Disperindag kurangnya jumlah pegawai didalam melakukan pengawasan sehingga kegiatan pengawasan belum memberikan trobosan terhadap penanggulangan pencapaian kemampuan pemilik usaha Pandai Besi.

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pembinaan Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar melalui pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya jumlah pegawai didalam melakukan pengawasan sehingga kegiatan pengawasan berlangsung begitu saja tanpa ada evaluasi terkait adanya kendala dan permasalahan didalam pengelolaan Pandai Besi oleh masyarakat. Sehingga dapat dikatakan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya) dalam kata gori cukup baik.

4.1.4 Memberikan pendidikan dan pelatihan

Memberikan pendidikan dan pelatihan adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar memberikan pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan usaha kerajinan industri agar kepemilikan usaha kerajinan industri paham serta mengetahui bagaimana pengembangan usaha hasil kerajinan industri tersebut. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Analisis Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya).

Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Memberi pengarahan yaitu :

1. Kegiatan Pelatihan secara tertulis.
2. Kegiatan Pelatihan dalam bentuk peraktek.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Analisis Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya) dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel 4.7 Jawaban Responden Mengenai Indikator Memberikan pendidikan dan pelatihan dalam Analisis Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya)

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kegiatan Pelatihan secara tertulis.	11 (37%)	17 (57%)	2 (7%)	30
2	Kegiatan Pelatihan dalam bentuk peraktek.	8 (27%)	14 (47%)	8 (27%)	30
Jumlah		19	31	10	60
Rata-rata		10	16	5	30
Persentase		33%	53%	14%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Memberikan pendidikan dan pelatihandalam item penilaian Kegiatan Pelatihan secara tertulis yang mana responden penelitian pada Analisis Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya) yang menjawab baik

sebanyak 11 responden atau 37% dengan alasan, kegiatan pelatihan secara tertulis sudah dilakukan didalam pengembagan usaha Pandai Besi. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 17 responden atau 57% dengan alasan, kegiatan pelatihan secara tertulis didalam pengembangan usaha Pandai Besi melalui pemberian materi tata cara pengembangan usaha Pandai Besi akan tetapi bimbingan yang diberikan masih kurangnya waktu yang diberikan dikarenakan masyarakat pengrajin Pandai Besi rata-rata memmiliki tingkat kemampuan pendidikan SMA sehingga perlunya kegiatan bimbingan yang memakan waktu lama sampai dengan 1 minggu. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 2 responden atau 7% dengan alasan, kegiatan pelatihan secara tertulis belum terlaksana dengan baik dikarenakan singkatnya waktu bimbingan secara tertulis sehingan belum meberikan dampak terhadap pengetahuan pengrajin Pandai Besi.

Kemudian untuk item penilaian Kegiatan Pelatihan dalam bentuk peraktekyang mana responden penelitian pada Analisis Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya) yang menyatakan baik berjumlah 8 responden atau 27% dengan alasan, Kegiatan Pelatihan dalam bentuk perakteksudah dialkukan secara langsung didalam pengembangan pengelolaan Pandai Besi. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 14 responden atau 47% dengan alasan, Kegiatan Pelatihan dalam bentuk perakteksudah dilakukan akan tetapi bimbingan yang diberikan belum memberikan dampak pengetahuan bagi pengrajian Pandai Besi dikarenakan waktu

yang singkat 5 hari seharusnya minimal 1 minggu. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 8 responden atau 27% dengan alasan, Kegiatan Pelatihan dalam bentuk peraktekbelum terlaksana dengan baik dikarenakan singkatnya waktu bimbingan secara lisan sehingga belum memberikan dampak pengetahuan terhadap pengrajin Pandai Besi.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Memberi bimbingan di dalam Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya) dalam katagori cukup baik, kata gori cukup baik dengan nilai responden 16 atau 53% dengan alasan,Kegiatan pembinaan pengrajin Pandai Besi melalui kegiatan secara tertulis dan kegiatan pelatihan praktek belum memberikan dampak pengetahuan bagi pengrajin Pandai Besi dikarenakan kemmapuan pelatihan masih terlihat sesuai dengan kemampuan para pengrajian Pandai Besi yang seharusnya pelatihan memiliki kemampuan yang lebih dari yang menerima pelatih dan didasarkan kemampuan pendidikan sesuai dengan bidangnya sehingga kegiatan pelatihan memberikan potensi terhadap yang menerima pelatihan tersebut.Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Kegiatan Pelatihan secara tertulis, Kegiatan Pelatihan dalam bentuk peraktek.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Kepala Seksi Pembinaan IKM Aneka IndustriDinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Bapak Topan Ramsilas dalam Pembinaan Pengrajin Pandai Besi pada tanggal 05 Agustus 2019.

“...Sejauh ini kegiatan pendidikan dan pelatihan yang kita lakukan sudah sesuai dengan pengembangan kemampuan pengrajin Pandai Besi, meskipun kegiatan yang kami lakukan masi mengalami kendala didalam pelatihannya dikarenakan kurangnya waktu kegiatan pelatihan yang telah ditetapkan, akan tetapi kami selalu berusaha memberikan pelatihan yang terbaik bagi pengrajian Pandai Besi....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pembinaan Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya oleh Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampardengan melakukan kegiatan secara tertulis dan kegiatan pelatihan praktek belum memberikan dampak pengetahuan bagi pengrajin Pandai Besi dikarenakan kemampuan pelatihan masih memiliki kemampuan yang sama dengan kemampuan para pengrajian Pandai Besi sehingga kegiatan pelatihan belum memberikan pengetahuan yang luas bagi pemilik usaha Pandai Besi.

Berdasarkan hasil Kuesioner, wawancara dan Observasi penulis menganalisa bahwa diketahui bahwa Pembinaan Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya oleh Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar melalui kegiatan secara tertulis dan kegiatan pelatihan praktek belum memberikan dampak pengetahuan bagi pengrajin Pandai Besi dikarenakan kemmpauan pelatihan masih terlihat sesuai dengan kemampuan para pengrajian Pandai Besi yang seharusnya pelatihan memiliki kemampuan yang lebih dari yang menerima pelatih dan didasarkan kemampuan pendidikan sesuai dengan bidangnya sehingga kegiatan pelatihan memberikan potensi terhadap yang menerima pelatihan tersebut. Sehingga dapat dikatakan Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar

(Studi Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya) dalam kata gori cukup baik.

4.1.5 Memberi buku petunjuk

Memberi buku petunjuk adalah Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar memberikan buku petunjuk dalam pengembangan hasil kerajinan industri yang diberikan agar masyarakat lebih paham bagaimana penanganannya lebih cepat dan maksimal serta dapat bersaing ditegah pasar ekonomi masyarakat. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Analisis Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya). Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Memberi pengarahan yaitu :

1. Pengembangan usaha Pandai Besi
2. Penanganan hambatan usaha Pandai Besi.
3. Pengembangan Pemasaran usaha Pandai Besi.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Analisis Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya) dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel 4.8 Jawaban Responden Mengenai Indikator Memberi Memberi buku petunjuk dalam Analisis Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya)

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pengembangan usaha Pandai Besi.	9 (30%)	17 (57%)	4 (13%)	30
2	Penanganan hambatan usaha Pandai Besi.	8 (27%)	18 (60%)	4 (13%)	30
3	Pengembangan Pemasaran usaha. Pandai Besi.	7 (23%)	20 (67%)	3 (10%)	30
Jumlah		24	55	11	90
Rata-rata		8	18	4	30
Persentase		27%	60%	13%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Memberi buku petunjuk dalam item penilaian Pengembangan usaha Pandai Besi yang mana responden penelitian pada Analisis Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya) yang menjawab baik sebanyak 9 responden atau 30% dengan alasan, Pengembangan usaha Pandai Besi melalui buku petunjuk yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 17 responden atau 57% dengan alasan, Pengembangan usaha Pandai Besi melalui buku petunjuk didalam pengembangan kemampuan pengrajin Pandai Besi. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 4 responden atau 13% dengan alasan, Pengembangan usaha Pandai Besi melalui buku petunjuk sudah diberikan akan tetapi didalam buku petunjuk pengrajin masih bingung dan perlunya secara langsung dilakukan penjelasan.

Kemudian untuk item penilaian Penanganan hambatan usaha Pandai Besi yang mana responden penelitian pada Analisis Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya) yang menyatakan baik berjumlah 8 responden atau 27% dengan alasan, Penanganan hambatan usaha Pandai Besi melalui buku petunjuk sudah diberikan terhadap para pengrajin. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 18 responden atau 60% dengan alasan, Penanganan hambatan usaha Pandai Besi sudah diberikan terhadap pengrajin Pandai Besi akan tetapi didalam buku petunjuk pengrajin belum memahami kegiatan yang dirahakan serata belum semua pengrajin menerima buku petunjuk yang dibagikan. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 4 responden atau 13% dengan alasan, Penanganan hambatan usaha Pandai Besi melalui buku petunjuk belum terlaksana dengan baik dimana masih banyak pengrajin belum menerima buku petunjuk didalam menangani hambatan didalam pengelolaan Pandai Besi.

Kemudian untuk item Penilaian Pengembangan Pemasaran usaha. Pandai Besi yang mana responden penelitian Analisis Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya) yang menyatakan baik sebanyak 7 responden atau 23% dengan alasan, Pemasaran usaha Pandai Besi melalui pemberian buku petunjuk sudah diberikan bagi pengrajin Pandai Besi. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 20 responden atau 67% dengan alasan, Pemasaran usaha Pandai Besi melalui buku petunjuk

sudah dilakukan akan tetapi belum semua pengrajin pandai menerima buku petunjuk dan terlihat pengrajin belum memahami secara luas penjelasan yang ada didalam buku petunjuk. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 3 responden atau 10% dengan alasan, Pemasaran usaha Pandai Besi melalui buku petunjuk yang diberikan bagi pengrajin Pandai Besi belum terlaksana dengan baik dimana diketahui masih banyak pengrajin belum menerima buku panduan didalam pemasaran hasil pengelola Pandai Besi.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Memberi buku petunjuk di dalam Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya) dalam katagori cukup baik, kata gori cukup baik dengan nilai responden 18 atau 60% dengan alasan, pengembangan Pandai Besi, pemasaran dan penanggulangan hambatan pengelolaan Pandai Besi melalui buku petunjuk belum terlaksana dengan baik dimana pengrajin belum memahami penjelasan dari buku petunjuk yang diberikan dan pengrajin belum secara merata menerima buku petunjuk yang diberikan sehingga tidak semua pengrajin memahami secara luas arahan didalam buku petunjuk yang telah disediakan. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan Memberi pengarahan dalam Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya) melalui Pengembangan usaha Pandai Besi, Penanganan hambatan usaha Pandai Besi, Pemasaran usaha Pandai Besi.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan IKM Aneka Industri Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Bapak Topan Ramsilas dalam Pembinaan Pengrajin Pandai Besi pada tanggal 05 Agustus 2019.

“...Sejauh ini kami didalam pengembangan pandai Besi sudah memberikan buku petunjuk terhadap pengrajin Pandai Besi agar mereka lebih memahami bentuk pengembangan Pandai Besi, pemasaran dan penanggulangan hambatan pengelolaan Pandai Besi, meskipun masih terlihat pengrajin memahami bentuk penjelasan didalam buku petunjuk akan tetapi kami selalu memberikan pengarahan apabila dipertanyakan...”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pembinaan Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya oleh Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar diketahui pengembangan Pandai Besi, dan bentuk pemasaran dan penanggulangan hambatan pengelolaan Pandai Besi melalui buku petunjuk akan tetapi buku petunjuk yang diberikan tidak semua pengrajin memahami secara luas arahan dan penjelasan didalamnya.

Berdasarkan hasil Kuesioner, wawancara dan Observasi penulis menganalisa bahwa diketahui bahwa Pembinaan Pengrajin Pandai Besi Di Kecamatan Rumbio Jaya oleh Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar diketahui pengembangan Pandai Besi, serta pemasaran dan penanggulangan hambatan pengelolaan Pandai Besi melalui buku petunjuk belum terlaksana dengan baik dimana pengrajin belum memahami penjelasan dari buku petunjuk yang diberikan dan pengrajin belum secara merata menerima buku petunjuk yang diberikan sehingga tidak semua pengrajin memahami secara luas arahan didalam buku petunjuk yang telah disediakan. Sehingga dapat dikatakan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya) dalam kata gori cukup baik.

Untuk mengetahui semua jawaban dari responden penelitian yang mana bertujuan untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden penelitian maka dibuatlah rekapitulasi jawaban responden penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.9 Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Analisis Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya).

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup	Baik Kurang Baik	
1	Memberi pengarahan	9 (30%)	17 (57%)	4 (14%)	30
2	Memberi bimbingan	10 (33%)	16 (53%)	4 (14%)	30
3	Melakukan pengawasan	10 (33%)	12 (40%)	8 (27%)	30
4	Memberikan pendidikan dan pelatihan	10 (33%)	16 (53%)	4 (14%)	30
5	Memberi buku petunjuk	8 (27%)	18 (60%)	4 (13%)	30
Jumlah		47	79	24	150
Rata-rata		9	16	5	30
Persentase		30%	53%	17%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel rekapitulasi di atas terlihat bahwa responden Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya) dalam Memberi pengarahan yang menjawab baik 9 atau 30%, Selanjutnya untuk

jawaban cukup baik 17 atau 57%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 4 atau 14%.

Untuk indikator kedua yaitu Memberi bimbingan dalam Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya) Dalam Memberi bimbingan yang menjawab baik 13 responden atau 33%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 16 responden atau 53%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 4 responden atau 14%.

Untuk indikator ketiga Melakukan pengawasandalam Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya) Dalam Melakukan pengawasan yang menjawab baik 10 responden atau 33%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 12 responden atau 40%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 8 responden atau 27%.

Untuk indikator keempat Memberikan pendidikan dan pelatihandalam Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya) Dalam Memberikan pendidikan dan pelatihanyang menjawab baik 10 responden atau 33%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 16 responden atau 53%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 4 responden atau 14%.

Untuk indikator kelima Memberi buku petunjukdalam Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten

Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya) Memberi buku petunjuk yang menjawab baik 8 responden atau 27%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 18 responden atau 60%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 4 responden atau 13%.

4.4 Hambatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya)

Adapun hambatan yang dapat penulis ketahui mengenai Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya), meliputi :

1. Memberi pengarahan

Memberikan pengarahan melalui pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar belum memiliki kemampuan didalam meningkatkan pengetahuan pengrajin Pandai Besi dikarenakan belum memiliki pengetahuan secara luas tentang pengelolaan usaha Pandai Besi melainkan hanya upaya pengembangan semata saja seperti pengenalan alat-alat dan penggunaannya dan kegiatan pemasarannya melainkan pengarahan tidak pada bagaimana praktek teknik pengukiran dan kecepatan penyelesaian bentuk-bentuk besi yang akan ditempa sehingga kegiatan pengarahan hanya pada bagian tertentu saja.

2. Memberi bimbingan

Kegiatan Bimbingan belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya waktu kegiatan pembinaan dimana ketetapan bimbingan selama 5 hari kan tetapi

dilaksanakan di penuh di 5 hari karena terlalu banyak waktu jeda istirahat sementara kegiatan pembinaan dilakukan secara tertulis, lisan dan praktek yang seharusnya kegiatan pembinaan dapat dioptimalkan sampai dengan 6 hari penuh sehingga memberikan dampak pemahaman dan pengetahuan pengrajin Pandai Besi lebih baik lagi.

3. Melakukan pengawasan

Kegiatan pengawasan belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya jumlah pegawai didalam melakukan pengawasan dimana jumlah pegawai didalam melakukan pengawasan sebanyak 4 orang sementara ada 30 usaha Pandai Besi yang harus diperhatikan sehingga kegiatan pengawasan berlangsung begitu saja tanpa ada evaluasi terkait adanya kendala dan permasalahan didalam pengelolaan Pandai Besi oleh pengrajin.

4. Memberikan pendidikan dan pelatihan

Kegiatan pendidikan dan pelatihan belum memberikan dampak pengetahuan bagi pengrajin Pandai Besi dikarenakan kemampuan pelatihan masih terlihat belum menguasai materi dan praktek pengelolaan Pandai Besi melainkan pendidikan dan pelatihan yang diberikan hanya secara umum saja yang seharusnya pelatih memiliki kemampuan yang lebih dari yang menerima pelatihan dan didasarkan kemampuan pendidikan sehingga kegiatan pelatihan belum memberikan dampak terhadap potensi kemampuan Pemilik usaha Pandai Besi.

5. Memberi buku petunjuk

Buku petunjuk yang diberikan bagi pemilik usaha Pandai Besi belum memberikan pengembangan wawasan secara luas dikarenakan buku petunjuk yang

diberikan belum secara rinci terkait bentuk dan upaya pengembangan pengelolaan Pandai Besi melainkan hanya pembahasan umum pengembangan Pandai Besi sehingga buku petunjuk yang diberikan belum memberikan wawasan pengetahuan mulai dari pengenalan Besi, kegiatan praktik pengelolaannya sampai dengan pengemasan pemasaran.



Dokumen ini adalah Arsip Miiik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan pemaparan dari bab-bab sebelumnya, telah dapat dilihat bahwa Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya) dikatakan cukup baik dimana diketahui pembinaan Pandai Besi yang dilakukan terhadap kepemilikan usaha Pandai Besi dengan melakukan pelatihan dalam bentuk tertulis, modul dan kegiatan praktek lapangan pengelolaan Pandai Besi dan upaya pemasaran. Namun pelaksanaan pembinaan belum maksimal hal ini dikarenakan kurangnya waktu kegiatan pembinaan didalam pengembangan pengetahuan kepemilikan usaha Pandai Besi, belum dilakukannya kegiatan pengawasan akan hasil kegiatan setiap usaha yang telah mengikuti pembinaan sehingga terlihat hanya sebatas kegiatan pembinaan saja.
2. Hambatan pelaksanaan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar (Studi Pengrajin Pandai Besi di Kecamatan Rumbio Jaya) bahwa
 - a. Kegiatan pembinaan yang diberikan terhadap pengrajin Pandai Besi belum terlaksana dengan maksimal hal ini dikarenakan kurangnya waktu kegiatan pembinaan sehingga belum memberikan dampak

pengetahuan pengrajin Pandai Besi yang seharusnya dapat dilakukan selama 6 Hari melainkan hanya 5 hari.

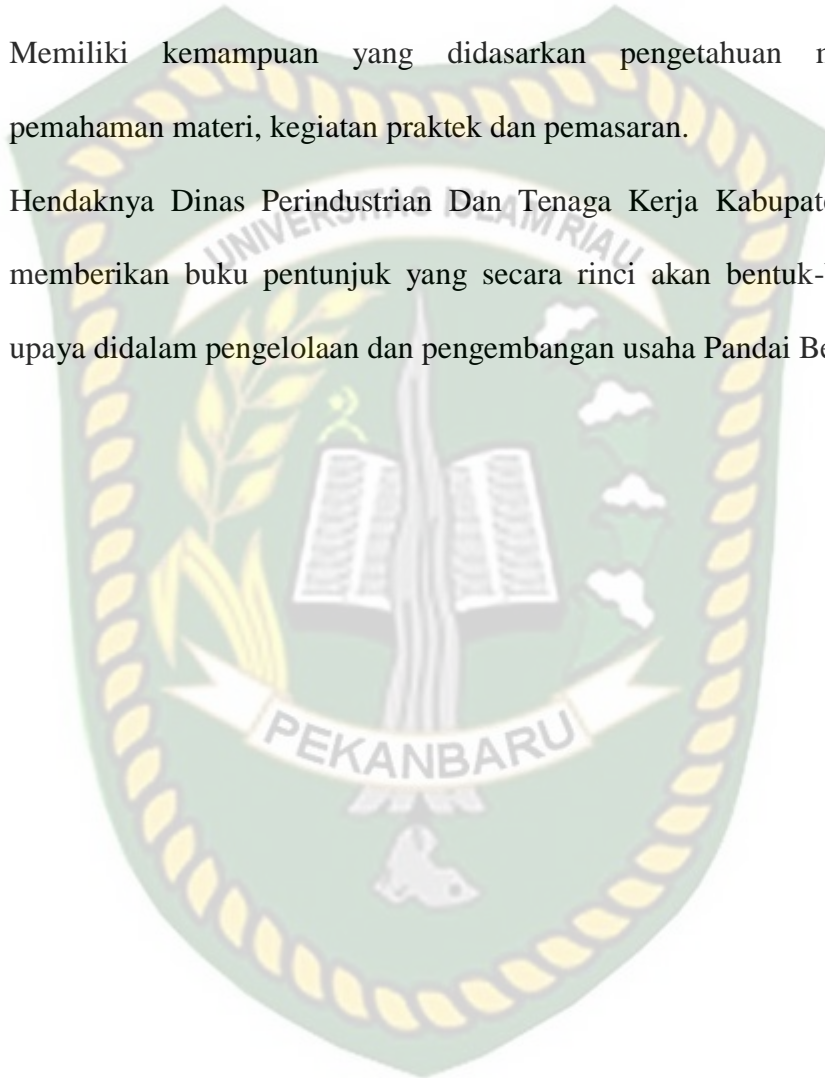
- b. Kurangnya jumlah petugas didalam melakukan kegiatan pembinaan serta kegiatan pengawasan di setiap penerima pembinaan di lokasi usaha masing-masing melainkan berlangsung begitu saja tanpa ada evaluasi terkait adanya kendala dan permasalahan didalam pengelolaan Pandai Besi oleh pengrajin.
- c. Diketahui kemampuan petugas didalam memberikan pelatihan belum memiliki kemampuan didalam pembaharuan pengetahuan pemilik usaha Pandai Besi.
- d. Belum adanya bantuan modal dalam bentuk alat diberikan secara merata melainkan hanya orang tertentu saja.
- e. Belum adanya pembinaan bentuk dalam pengembangan pemasaran usaha Pandai Besi secara luas yang diberikan terhadap usaha pengrajin Pandai Besi.

5.2 Saran

1. Hendaknya Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kamparmeningkatkan waktu kegiatan pembinaan selama 6 hari penuh.
2. Hendaknya Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kamparmenambah jumlah pegtugas didalam melakukan pembinaan dari 4 orang seharusnya 10 orang.
3. Hendaknya Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar melakukan pengawasan rutin terhadap pengembangan kemampuan

pengrajin Pandai Besi agar adanya evaluasi terkait pencapaian pengelolaan Pandai Besi.

4. Hendaknya Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Memiliki kemampuan yang didasarkan pengetahuan mulai dari pemahaman materi, kegiatan praktek dan pemasaran.
5. Hendaknya Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar memberikan buku petunjuk yang secara rinci akan bentuk-bentuk dan upaya didalam pengelolaan dan pengembangan usaha Pandai Besi.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Agus Suryono. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Universitas Malang Press, Malang.
- Ati Cahayani, 2003. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, PT Gramedia Widiasama, Jakarta.
- Bayu Suryaningrat. 2001. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Bina Aksara.
- Bintoro Tjokroamidjojo. 2000. *Perencanaan Pembangunan*, Cetakan ke-12, CV. Masagung, Jakarta.
- Dadang Juliantara. 2003. *Pembaruan Desa, Bertumpuk Pada Yang Terbawah*, Lappera, Yogyakarta.
- Draha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-dimensi pemerintahan Desa*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Dewanta Setya, Awan, dkk. 2000. *Asas-asas Pemerintahan yang Baik : Antara Konsepsi dan Aktualisasi*, Aditya Media
- Gibson James. 1997. *Organisasi Perilaku* (Terjemahan Nunuk Adiarni), Bina Aksara, Jakarta,
- Ginangar Kartasasmita, 1997. *Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan)*, CIDEAS, Jakarta
- Hessel Nogi S. 2003. *Hukum Administrasi Negara; Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Good Governance*, Balairung, Yogyakarta.
- Inu Kencana Syafiie, 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Inu Kencana Syafiie. 2011. *dalam buku Etika Pemerintahan*. diterbitkan oleh Penerbit PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Inu Kencana Syafiie. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung.

- Ibnu Syamsi. 2004. *Pokok-pokok Organisasi & Manajemen*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kartini Kartono. 2004. *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Lailia Fatkul Janah, *Teori Peran*, Gunung Mas, Jakarta, 2009.
- Malayu Hasibuan, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Michael P Todaro. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta.
- Moelong, J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh.
- Musanef. 2003. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta,
- Mustafa Hasan. 2000. *Perspektif Dalam Psikologi Sosial*, Sarana Ilmu, Yogyakarta
- Nanang Fatah, *Landasan Manajemen, Rosdakarya*, Bandung, 2003.
- Nurul Qamar, 2009. *Pengantar Hukum Ekonomi*. diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Refleksi: Makassar.
- Philipus M. Hadjon. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Media Pressindo, Jakarta.
- Riyadi. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi menggali potensi dalam mewujudkan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Mikroekonomi teori pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syaiful Arief. 2006. *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan*, Averroes Cipta, Malang.
- Surya Nigrat, Bayu. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa*. Jakarta, Gramedia.

Sumber Saparin. 2003. *Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Pemerintah Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Siagian, Sondang P. 1996. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta, PT Gunung Agung.

_____ 2000. *Pembangunan (konsep Dimensi dan strategi)*. Jakarta, bumi aksara.

T. Gilarso. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Kanisius. Bandung.

Widjaja, H. A. W. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zulkarnaen, 1996. *Komunikasi Pembangunan*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan dalam negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian izin Usaha Mikro dan Kecil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Peraturan Bupati Kampar Nomor : 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.